

**PERANAN SEKTOR PERTANIAN
DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PROVINSI RIAU**

Oleh:

MIRANDA FARAMITA OCTAVIA. S

NPM : 144210108

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian*



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

PERANAN SEKTOR PERTANIAN
DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PROVINSI RIAU

SKRIPSI

NAMA : MIRANDA FARAMITA OCTAVIA. S

NPM : 144210108

PROGRAM STUDI : AGRIBISNIS

KARYA ILMIAH INI TELAH DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN
KOMPREHENSIF YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 09
DESEMBER 2020 DAN TELAH DISEMPURNAKAN SESUAI SARAN
YANG DISEPAKATI. KARYA ILMIAH INI MERUPAKAN SYARAT
PENYELESAIAN STUDI PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

MENYETUJUI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Ir, Saipul Bahri, M.Ec

DOSEN PEMBIMBING II

Sisca Vaulina, SP, MP

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dr. H. Siti Zahrah, MP

KETUA PROGRAM STUDI
AGRIBISNIS

Sisca Vaulina, SP, MP

KARYA ILMIAH INI TELAH DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN
KOMPREHENSIF FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU
TANGGAL 09 DESEMBER 2020

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Ir, Saipul Bahri, M.Ec	Ketua	
2	Sisca Vaulina, SP, MP	Sekretaris	
3	Dr. Azharuddin, M.Sc	Anggota	
4	Dr. Elinur, SP, M.Si	Anggota	
5	Heriyanto, SP, M.Si	Anggota	
6	Ilma Satriana Dewi, SP, M.Si	Notulen	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

MIRANDA FARAMITA OCTAVIA (144210108), Peranan Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau (dibawah bimbingan Bapak Dr. Ir, Saipul Bahri, M.Ec selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sisca Vaulina, SP, MP selaku dosen pembimbing II).

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui seberapa besar peran sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Riau, (2) apakah sektor pertanian memberikan multiplier efek yang besar terhadap sektor pertanian, (3) menganalisis seberapa besar pergeseran pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Riau dan (4) menganalisis penyerapan tenaga kerja sektor pertanian untuk lima tahun kedepan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan lokasi di Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data PDRB dan data jumlah angkatan kerja yang bekerja menurut 17 lapangan usaha selama periode 2015-2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Riau. Data dianalisis dengan *Location Quotient* (LQ), multiplier efek, *Shift Share* dan Proyeksi. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan analisis LQ, (1) Peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau tahun 2015-2019 menunjukkan nilai >1 , berarti sektor pertanian di Provinsi Riau merupakan sektor basis, artinya sektor pertanian di Provinsi Riau telah mampu menyerap tenaga kerja lokal. (2) Sektor pertanian memberikan multiplier efek yang meningkat selama tahun analisis. (3) Pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Riau dari tahun 2015-2019 mengalami pergeseran (*total change*) sebesar Rp. 20,307. Dimana ini berarti pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Riau tergolong dalam pertumbuhan yang progresif (maju). (4) Berdasarkan hasil proyeksi *pure forecast* diperoleh hasil proyeksi jumlah tenaga kerja di Provinsi Riau menurun pada setiap tahunnya.

Kata kunci : Tenaga Kerja, LQ, Multiplier Eeffect, Shift Share.

ABSTRACT

MIRANDA FARAMITA OCTAVIA (144210108), The Role of the Agriculture Sector in Labor Absorption in Riau Province (under the guidance of Dr. Ir, Saipul Bahri, M.Ec as supervisor I and Mrs. Sisca Vaulina, SP, MP as supervisor II).

The agricultural sector plays an important role in the economy of Riau Province. This study aims to: (1) find out how big the role of the agricultural sector is in the economy of Riau Province, (2) whether the agricultural sector has a large multiplier effect on the agricultural sector, (3) analyze how big the shift in the growth of the agricultural sector workforce in Riau Province and (4) analyzing employment in the agricultural sector for the next five years. The method used in this research is a literature study with a location in Riau Province. The data used are secondary data, namely PDRB data and data on the number of labor force working according to 17 business fields during the 2015-2019 period which were obtained from the Central Statistics Agency of Riau Province. Data were analyzed using Location Quotient (LQ), multi-effect effects, Shift Share and Projection. The results show that based on LQ analysis, (1) The role of the agricultural sector in labor absorption in Riau Province in 2015-2019 shows a value of > 1 , meaning that the agricultural sector in Riau Province is a basic sector, meaning that the agricultural sector in Riau Province has been able to absorb labor. local. (2) The agricultural sector provides a multiplier effect which increases during the analysis year. (3) The growth of the agricultural sector in Riau Province from 2015-2019 experienced a shift (total change) of Rp. 20,307. Where this means the growth in the number of workers in the agricultural sector in Riau Province is classified as progressive (advanced) growth. (4) Based on the results of the pure forecast projection, the projection results of the number of workers in Riau Province will decrease every year.

Keywords: Labor, LQ, Multiplier Effect, Shift Share.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Lahir di Labuhan Batu pada tanggal 01 Oktober 1996 dari pasangan Bapak Ichwan Sitompul dan Ibu Tarminah Harahap. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2008 di SDN 020 Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMPS Bina Siswa Kayangan Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah kejuruan di SMKN 1 Kandis Kecamatan kandis Kabupaten Siak dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Program Studi Agribisnis Strata Satu (S1) Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Pada tanggal 09 Desember 2020 penulis melakukan ujian komprehensif dan dinyatakan lulus ujian komprehensif dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Pertanian (SP) dengan judul skripsi “Peranan Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau”.

Miranda Faramita Octavia. S

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peranan Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau”. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain orang tua yang telah memberikan dukungan moril serta materil. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Ir, Saipul Bahri, M.Ec selaku pembimbing I dan Ibu Sisca Vaulina, SP, MP selaku pembimbing II, dan kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sudah berusaha membuat yang terbaik menurut kemampuan penulis, namun jika terdapat berbagai kelemahan penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Atas bantuan semua pihak, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Pekanbaru, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pembangunan.....	13
2.1.1. Pembangunan Ekonomi	14
2.1.2. Pembangunan Ekonomi Daerah	15
2.1.3. Pembangunan Pertanian	16
2.1.4. Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan	17
2.2. Ketenagakerjaan.....	18
2.2.1. Tenaga Kerja.....	20
2.2.2. Penyerapan Tenaga Kerja.....	21
2.3. PDRB.....	21

2.4. <i>Location Quotient (LQ)</i>	23
2.5. <i>Multiplier Effect</i>	24
2.6. <i>Shift Share</i>	26
2.7. Penelitian Terdahulu	30
2.8. Kerangka Pemikiran	39
3. METODE PENELITIAN	42
3.1. Metode, Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
3.2. Jenis dan Sumber Data	42
3.3. Konsep Operasional	43
3.4. Analisis Data	46
3.4.1. Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian.....	46
3.4.2. Analisis Multiplier Effect Tenaga Kerja Sektor Pertanian.....	47
3.4.3. Analisis Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian.....	48
3.4.4. Analisis Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Untuk Lima Tahun Kedepan (2020-2024).....	51
4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	52
4.1. Letak Geografi	52
4.2. Letak Topografi	53
4.3. Demografi	54
4.3.1. Penduduk	54
4.3.2. Sex Ratio	55
4.3.3. Pendidikan	56
4.4. Mata Pencaharian	57

4.5. Keadaan Pertanian	58
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	61
5.1. Peranan Sektor Tenaga Kerja dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau.....	61
5.2. Analisis Multiplier Effect Tenaga Kerja di Provinsi Riau.....	66
5.3. Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Riau.....	69
5.4. Analisis Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Untuk Lima Tahun Kedepan (Tahun 2020-2024).....	73
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
6.1. Kesimpulan.....	76
6.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. PDRB Provinsi Riau dan Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp) Tahun 2019.....	4
2. Angkatan Kerja yang Berkerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Riau dan Indonesia, Tahun 2019.....	7
3. Luas Wilayah Riau Menurut Kabupaten/Kota.....	53
4. Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut 17 Lapangan Usaha di Riau.....	57
5. Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Palawija di Provinsi Riau.....	58
6. Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Sayuran di Provinsi Riau.....	59
7. Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Buah-buahan di Provinsi Riau.....	59
8. Luas Panen, Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Riau.....	60
9. Hasil Analisis LQ (<i>Location Quotient</i>) Beberapa Sektor/ Lapangan Usaha di Provinsi Riau.....	62
10. Rata-rata Analisis Shift Share di Provinsi Riau.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tenaga kerja Rrovinsi Riau tahun 2019.....	9
2. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	41
3. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Riau.....	55
4. Pendidikan.....	56
5. Multiplier Efek Sektor Pertanian di Provinsi Riau.....	67
6. Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp), Tahun 2015-2019.....	83
2. PDRB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp), Tahun 2015-2019.....	84
3. Angkatan Kerja yang Berkerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Riau, Tahun 2015-2019.....	85
4. Angkatan Kerja yang Berkerja Menurut Lapangan Usaha di Indonesia Tahun 2015-2019.....	86
5. Hasil Analisis LQ (<i>Location Quotient</i>) Beberapa Lapangan Usaha di Provinsi Riau, Tahun 2015-2019.....	87
6. <i>Multiplier effect</i> Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau, Tahun 2015-2019.....	88
7. Analisis <i>shift share</i> Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau, Tahun 2015-2019.....	89
8. Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau, Tahun 2015-2019.....	94

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan dan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan bertahap ketingkat yang lebih maju dan lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap disegala bidang dan sektor maupun subsektor secara terencana dan terprogram. Salah satu cara mencapai keberhasilan pembangunan adalah dengan adanya pembangunan ekonomi.

Permasalahan yang sekaligus merefleksikan masih terbatasnya keberhasilan dalam mencapai sasaran pembangunan daerah terutama di negara berkembang seperti di Indonesia adalah masih tingginya tingkat pengangguran. Hingga kini tampaknya belum ada solusi tepat untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut. Bahkan lebih lanjut, masalah pengangguran yang cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan terhambatnya salah satu tujuan dari pembangunan nasional negara Indonesia yaitu berusaha mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan makmur.

Masalah pengangguran merupakan suatu masalah besar yang dihadapi khususnya disemua negara berkembang yang berpenduduk sangat banyak seperti negara Indonesia. Hal ini disebabkan penduduk yang mencari pekerjaan setiap tahun terus bertambah, sedangkan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka tidak mencukupi. Akibatnya, setiap tahun jumlah penganggur terus meningkat, sedangkan penduduk memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehingga

dapat bertahan hidup. Hal tersebut berarti permintaan terhadap jumlah pekerjaan juga bertambah.

Simanjuntak (1985) menyatakan bahwa jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak perlu menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di daerah itu cukup kuat memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja. Masalah penduduk dapat dipecahkan melalui pembangunan yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui penciptaan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang sesuai.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Di Indonesia, pembangunan di sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan.

Pembangunan pertanian telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian.

Provinsi Riau memiliki luas area 87.023,66 km² dan itu berarti setara dengan 18,4 persen dari wilayah Pulau Sumatera. Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti) dan dua kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, terdapat 169 kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat dan 1.876 kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa. Provinsi Riau memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2 persen (datar) seluas 1.157.006 hektar, kemiringan lahan 15-40 persen (curam) seluas 737.966 hektar. Secara umum topografi Provinsi Riau merupakan daerah dataran rendah dan agak bergelombang dengan ketinggian pada beberapa kota yang terdapat di wilayah Provinsi Riau antara 2-91 m diatas permukaan laut. (BPS Riau, 2019)

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga mesti bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan serta pertumbuhan yang dilaksanakan di daerah. Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB suatu daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kebijakan dan upaya pembangunan yang telah dan akan dilakukan menunjukkan kearah yang positif. Dalam penyajiannya, PDRB dibedakan atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena

tidak dipengaruhi oleh perubahan harga sedangkan PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat besar dan struktur ekonomi suatu daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan besarnya nilai PDRB Provinsi Riau dan Indonesia pada tahun 2019 . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel. 1 PDRB Provinsi Riau dan Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp) Tahun 2019.

No	Lapangan Usaha	PDRB Provinsi Riau Tahun 2019		PDRB Indonesia Tahun 2019	
		(Milyar Rp)	(%)	(Milyar Rp)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	129.732	26,16	1.354.957	12,90
2	Pertambangan dan Penggalian	85.634	17,27	806.206	7,67
3	Industri Pengolahan	153.305	30,91	2.276.683	21,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	324	0,06	111.437	1,06
5	Pengadaan Air	66	0,01	9.006	0,08
6	Konstruksi	42.899	8,65	1.108.425	10,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran	48.454	9,77	1.440.523	13,71
8	Transportasi dan Pergudangan	4.241	0,85	463.255	4,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.339	0,47	333.358	3,17
10	Informasi dan Komunikasi	4.726	0,95	589.435	5,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.592	0,92	443.042	4,21
12	Real Estat	4.611	0,92	316.837	3,01
13	Jasa Perusahaan	30	0,006	206.936	1,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	8.597	1,73	365.678	3,48
15	Jasa Pendidikan	2.533	0,51	341.329	3,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.020	0,20	127.507	1,21
17	Jasa lainnya	2.742	0,55	204.999	1,95
	Jumlah	495.845	100	10.499.612	100

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Riau tahun 2019 relatif besar, yaitu sebesar 129.732 milyar dan

persentase sebesar 26,16 % serta menempati urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Provinsi Riau dikenal dengan kawasan industri, tetapi bidang pertanian masih memberikan sumbangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Besarnya kontribusi sektor pertanian di Provinsi Riau didukung dengan luas lahan salah satunya ialah sawit yang relatif luas yaitu 2,5 juta Ha yang digunakan untuk budidaya sawit dan majunya subsektor perikanan di Provinsi Riau, sehingga sektor pertanian di Provinsi Riau dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Provinsi Riau. (BPS Provinsi Riau, 2019).

Untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Indonesia tahun 2019 relatif besar, yaitu sebesar 1.354.957 milyar dan persentase sebesar 12,90 % serta menempati urutan ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor pertanian di Indonesia sampai saat ini masih memegang peranan penting berdampingan dengan sektor lainnya, khususnya industri dan perdagangan. Untuk persentase PDRB, Provinsi Riau lebih unggul dari Indonesia karena kontribusi PDRB sektor lapangan usaha di Indonesia lebih banyak sehingga persentase PDRB sektor pertanian di Indonesia lebih kecil dari PDRB Provinsi Riau. Meski demikian kontribusi PDRB sektor pertanian untuk Provinsi Riau dan kontribusi PDRB sektor Pertanian di Indonesia memiliki kontribusi paling besar pada tahun 2019 karena mampu menghasilkan kelebihan produksi.

Melihat perkembangan masing-masing sektor ekonomi dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Riau dan PDRB Indonesia masih diperlukan pengkajian terhadap pertumbuhan dan kontribusi terhadap

sektor– sektor ekonomi serta pengkajian terhadap sektor ekonomi basis dan non basis yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi di Provinsi Riau. Dengan mengetahui dan memahami kinerja sektor ekonomi dalam pembangunan maka pemerintah dapat memutuskan serangkaian kebijakan pembangunan, khususnya yang terkait dengan ketersediaan kesempatan kerja yang luas di sektor ekonomi dan dengan berlakunya otonomi daerah merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif, menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya lokalnya bagi kesejahteraan masyarakatnya khususnya Provinsi Riau. Oleh karena itu, dengan pengembangan sektor ekonomi yang memiliki prospek tersebut dapat dijadikan tulang punggung atau andalan sebagai modal dasar dalam rangka pembangunan perekonomian khususnya dalam merangsang terciptanya kesempatan kerja, guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Indikator pembangunan suatu wilayah juga dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam berbagai lapangan usaha. Berdasarkan perkembangannya, maka dilakukan perbandingan antara jumlah tenaga kerja di sektor pertanian Provinsi Riau dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia pada tahun 2019. Sektor pertanian masih memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk menyerap tenaga kerja yang ditunjukkan dengan besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data jumlah angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan usaha di Provinsi Riau dan Indonesia pada Tabel 2:

Tabel 2. Angkatan Kerja yang Berkerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Riau dan Indonesia, Tahun 2019.

No	Lapangan Usaha	Angkatan Kerja Provinsi Riau Tahun 2019		Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2019	
		(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.193.549	38,34	38.109.196	29,45
2	Pertambangan dan Penggalian	25.642	0,82	1.375.035	1,06
3	Industri Pengolahan	264.107	8,48	18.228.162	14,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.091	0,25	312.261	0,24
5	Pengadaan Air	12.952	0,41	415.278	0,32
6	Konstruksi	162.514	5,22	7.624.749	5,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran	489.313	15,71	24.468.769	18,91
8	Transportasi dan Pergudangan	133.681	4,29	5.202.667	4,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	183.623	5,89	8.796.831	6,79
10	Informasi dan Komunikasi	28.343	0,91	942.258	0,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	41.230	1,32	1.784.361	1,37
12	Real Estat	2.468	0,07	337.609	0,26
13	Jasa Perusahaan	41.728	1,34	1.690.871	1,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	145.178	4,66	5.148.575	3,97
15	Jasa Pendidikan	215.131	6,91	6.599.165	5,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64.829	2,08	1.983.783	1,53
17	Jasa lainnya	100.395	3,22	6.346.622	4,90
	Jumlah	3.112.774	100	129.366.192	100

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2020

Berdasarkan Tabel 2 dapat kita ketahui bahwa lapangan usaha sektor pertanian mempunyai kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.193.549 jiwa dan persentasenya sebanyak 38,34%. Begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2019 yaitu sebanyak 1.193.549 jiwa dan persentasenya sebanyak 29,45 %. Dari

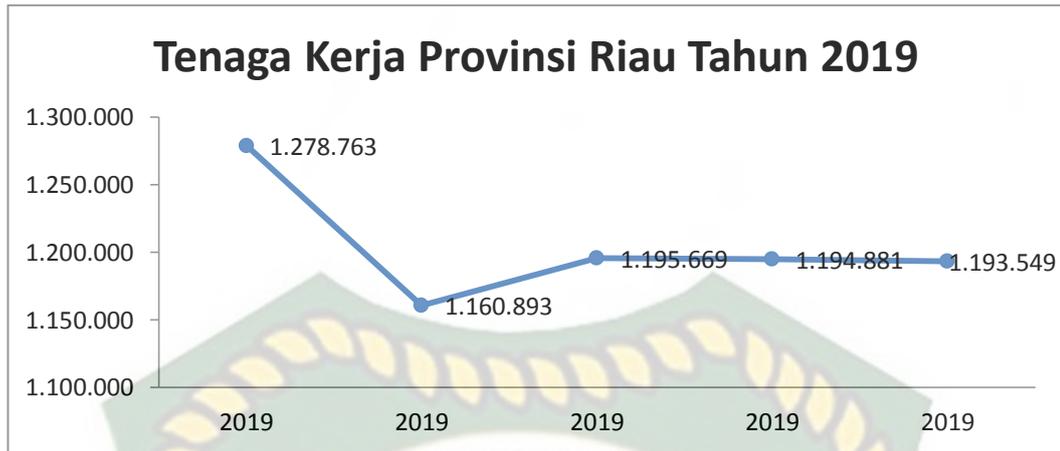
Tabel 2 dapat dibandingkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, ini karena sebagian besar penduduk Provinsi Riau dan Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Untuk persentase tenaga kerja, Provinsi Riau lebih unggul dari Indonesia karena jumlah penyerapan sektor lapangan usaha di Indonesia lebih banyak sehingga persentase tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia lebih kecil dari persentase tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Riau. Meski demikian sektor pertanian Provinsi Riau dan Indonesia memiliki penyerapan paling banyak pada tahun 2019 dan berpotensi untuk dikembangkan.

Walaupun sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja, tetapi terdapat masalah dalam perkembangan kota dan permukiman yang terus terjadi mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Kondisi ini berdampak pada semakin sempitnya luas lahan pertanian. Setidaknya terdapat dua alternatif yang ditempuh, yaitu membuka lahan pertanian baru dan beralih pekerjaan dalam bidang non pertanian. Kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan dari pertanian sudah tidak lagi mampu mengimbangi peningkatan harga berbagai kebutuhan hidup petani. Pendapatan yang semakin rendah berakibat pada semakin tidak menariknya pekerjaan sebagai petani. Kondisi ini pula yang mengakibatkan tenaga kerja produktif, terutama yang berusia muda, lebih memilih bidang pekerjaan di luar sektor pertanian. Mereka lebih baik mencari pekerjaan di kota yang upahnya lebih baik, sehingga desa kekurangan tenaga kerja potensial yang masih muda untuk mengembangkan sektor pertanian.

Dari Tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa sektor pertanian masih memiliki peran yang penting dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Kontribusi sektor ini

dalam ketenagakerjaan masih sangat tinggi walaupun ada kecenderungan semakin meningkatnya penambahan tenaga kerja pada sektor industri dan perdagangan. Kontribusi dari sektor pertanian ternyata tidak diimbangi dengan kebijakan yang sepenuhnya pro terhadap pertanian. Rencana strategis pembangunan pertanian, yang di dalamnya cukup mendukung terhadap upaya pembangunan pertanian, pada kenyataannya setelah beberapa waktu berlangsung, belum banyak menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani dan sektor pertanian. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih sering bertentangan dengan keinginan petani atau dapat dikatakan merugikan petani. Kenaikan harga pupuk, impor produk pertanian, dan lain-lain merupakan contoh riil dari pertentangan antara petani dan pemerintah. Semua itu, menempatkan sektor pertanian dan petani pada posisi yang marginal. Sektor pertanian menjadi tidak menarik bagi penduduk usia muda, sehingga muncul gejala kekurangan buruh tani di pedesaan. Mereka cenderung lebih tertarik untuk melakukan urbanisasi, sehingga tenaga kerja yang tersisa di pedesaan adalah penduduk usia tua (aging population)

Sektor pertanian Provinsi Riau memberikan kontribusi besar dalam pembangunan wilayah dan menyerap tenaga kerja, untuk itu dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Tenaga kerja Rrovinsi Riau tahun 2019

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja akan tetapi cenderung menurun, ini di akibatkan karena banyaknya alih fungsi lahan, rendahnya upah tenaga kerja, kenaikan harga pupuk, tingkat pendidikan dan produktivitas yang rendah. Hal ini merupakan alasan dilakukannya penelitian ini. Kajian lebih mendalam mengenai peran sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja, hal ini akan bermanfaat sebagai informasi dalam perencanaan perluasan kesempatan kerja di Provinsi Riau. Berdasarkan permasalahan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sampai saat ini masih ditempatkan pada posisi marginal, sehingga produktivitasnya paling rendah diantara sektor lainnya. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini agar sektor pertanian mendapat perhatian penuh ditujukan untuk menjadikan sektor ini memiliki daya saing dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Sektor pertanian merupakan sektor prioritas dalam pembangunan daerah Provinsi Riau karena sektor ini memberikan peranan yang cukup besar terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau?
2. Bagaimana *multiplier effect* tenaga kerja di Provinsi Riau?
3. Bagaimana pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Riau?
4. Bagaimana proyeksi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian untuk lima tahun kedepan (2020-2024) di Provinsi Riau?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.
2. *Multiplier effect* tenaga kerja di Provinsi Riau.
3. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Riau.
4. Proyeksi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian untuk lima tahun kedepan (2020-2024) di Provinsi Riau.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait, antara lain:

1. Bagi penulis, berguna untuk menambah wawasan berkaitan dengan topik penelitian dan mengetahui lebih mendalam mengenai keadaan wilayah dan keadaan pembangunan Provinsi Riau, serta merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pertanian di Universitas Islam Riau.

2. Bagi pemerintah Provinsi Riau, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam perencanaan tenaga kerja, khususnya pada sektor pertanian?
3. Bagi pembaca, sebagai bahan informasi mengenai topik penelitian dan menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya.
4. Bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang yang sama.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian difokuskan pada Peranan Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp) dan Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut 17 Lapangan Usaha di Riau, Tahun 2015-2019 (Jiwa). Sementara itu, proyeksi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian lima tahun kedepan dimulai pada tahun 2020-2024.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan

Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk didalamnya struktur sosial, sikap masyarakat serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Widodo, 2006).

Menurut Basri & Mulyadi (2006), pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2010). Pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012).

Dalam ajaran islam, pengertian tentang pembangunan disebutkan sebagai “ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ” (keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya,

QS:93:4). Pembangunan menurut perspektif islam terdapat pada hadist yang telah di riwayatkan oleh Anas bin Malik, dimana Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud “sesungguhnya orang kafir, apabila mengerjakan suatu kebaikan, diberikan kepadanya sebuah kenikmatan dunia. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka Allah S.W.T akan menyimpan untuknya kebaikan-kebaikan di akhirat dan memberi rezeki kepadanya di dunia sesuai dengan ketaatannya kepada Allah S.W.T”.

2.1.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Keunggulan komparatif lebih menekankan kepemilikan sumber ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan suatu daerah, seperti : kepemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain-lain. Sementara itu, keunggulan kompetitif lebih menekankan efesiensi pengelolaan (manajemen, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) penggunaan sumber-sumber tersebut dalam produksi, konsumsi maupun distribusi (Widodo, 2006).

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti tinggi pertumbuhan ekonomi danpen dapatan perkapita, semakin terbukanya kesempatan kerja sehingga dapat menekan pengangguran, menurunnya jumlah penduduk yang hidup di bawah kemiskinan absolut, pergeseran struktur ekonomi kearah yang lebih modern dan semakin besarnya kemampuan keuangan untuk membiayai administrasi pemerintah dan kegiatan pembangunan (Soekarni dan Mahmud, 2000).

2.1.2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah pokok pembangunan ekonomi daerah adalah pada penekanan terhadap kebijakankebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999).

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah (Darwanto, 2006).

Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi daerah, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha di daerah yang bersangkutan (Suparmoko, 2002).

2.1.3. Pembangunan Pertanian

Peran pertanian dalam pembangunan pertanian hanya sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah untuk berkembangnya sektor industri yang berfungsi sebagai unggulan dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Todaro, 2000).

Program pembangunan pertanian terletak sebagian bagian dari pembangunan nasional sehingga apa yang menjadi strategi dalam pembangunan nasional harus tercermin dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Apabila terjadi kegagalan pembangunan nasional, maka akan membawa imbas terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan (Pranandji, 2003).

Menurut Apriyanto (2005), dalam periode 2005-2009 pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai visi: “Terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani”. Pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah pendayagunaan secara optimal sumberdaya pertanian dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, yaitu :

- a. Membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri dan kelembagaan pertanian yang kokoh
- b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan

- c. Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan
- d. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian
- e. Menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan
- f. Membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

2.1.4. Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan

Todaro (2000), mengemukakan bahwa secara tradisional peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan bahkan hanya dianggap sebagai unsur penunjang semata. Berdasarkan pengalaman sejarah yang dijalani oleh negara-negara barat, apa yang disebut sebagai pembangunan ekonomi di identikkan dengan transformasi Struktural terhadap perekonomian secara cepat, yakni dari perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi perekonomian industri modern dan jasa-jasa yang serba lebih kompleks. Dengan demikian, peranan utama pertanian dianggap hanya sebatas sebagai sumber tenaga kerja dan bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor-sektor industri yang dinobatkan sebagai sektor unggulan dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Sektor pertanian di Indonesia memiliki kemampuan dalam mengisi pembangunan yang dipercayai dapat menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pertanian dapat memenuhi lima syarat utama sebagai sektor andalan, yaitu tangguh, progresif, ukurannya cukup luas, artikulatif dan responsif. Ketangguhan sektor pertanian di indikasikan oleh kemampuannya dalam memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung. Sektor pertanian

berpotensi progresif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional jika didukung dengan kebijaksanaan yang tepat (Daniel, 2002).

Pembangunan pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia:

- a. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini
- b. Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan

(Brawijaya, 2008).

Permasalahan pokok negara dunia ketiga, pada prinsipnya sama, yaitu membunyahnya jumlah tenaga kerja, kecilnya modal, fluktuasi hasil produksi yang kadang-kadang ekstrim, rendahnya penguasaan teknologi, kecilnya return of capital (ROC), investasi yang minim, pemerataan dan konversi nilai tukar produksi pertanian yang tidak memadai. Dari banyaknya persoalan tersebut, John Mellor, seorang pakar ekonomi pertanian mengemukakan bahwa negara-negara berkembang memerlukan strategi pembangunan yang berorientasi pada pertanian dan tenaga kerja. Selain karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, Mellor berpendapat pertanian menjadi penting karena ia juga memberi pengaruh yang demikian besar terhadap perekonomian secara menyeluruh (Nugroho, 2007).

2.2. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja itu sendiri merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi

tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Dalam kegiatan proses produksi, tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting, karena manusia yang menggerakkan semua sarana produksi seperti bahan mentah, tanah, air dan sebagainya. Meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan pangan, sandang, perumahan tapi juga perlunya perluasan kesempatan kerja. Penduduk sebagai sumber dari persediaan tenaga kerja akan menimbulkan suatu dilema bila jumlahnya tidak seimbang dengan kemampuan sektor ekonomi. Dilema yang terjadi adalah banyaknya pengangguran maupun setengah pengangguran dan paling tidak akan banyak terjadi ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan yang ditangani.

Menurut undang-undang RI No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1991) tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Menurut Artoyo (1999), pengertian tenaga kerja secara umum adalah pengertian tentang potensi yang terkandung dalam diri manusia yang dikaitkan dengan pendayagunaan diberbagai kegiatan usaha yang ada. Keterlibatan pada unsur jasa atau tenaga kerja dalam hubungan kerja sehingga timbullah penyebutan tenaga kerja bagi yang menyediakan jasa tersebut, pengusaha atau yang memperkerjakan.

2.2.1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*Man Power*) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan sedang mencari kerja. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, mengurus rumah tangga, golongan lain-lain atau penerima pendapatan (Payaman,1998). Secara operasional penduduk yang digolongkan tenaga kerja adalah bagian penduduk yang berumur 15-64 tahun, sesuai dengan klasifikasi dan pengaturan dunia internasional. Tjiptoherijanto (1999) mengemukakan tenaga kerja adalah penduduk pada usia 15-64 tahun. dengan kata lain tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang-barang dan jasa-jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka bersedia berpartisipasi dalam perkembangannya.

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Menurut BPS (2000), dalam hal tenaga kerja menyebutkan bahwa penduduk yang masuk dalam kelompok usai kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang terbagi kedalam dua kelompok yaitu, kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Bagi penduduk yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan dikelompokan sebagai angkatan kerja, sedangkan penduduk yang seharusnya memiliki kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya dikelompokan sebagai bukan angkatan kerja. Pengertian tenaga kerja menurut BPS (2000) terdapat tiga katagori yaitu :

- a. Tenaga kerja produksi yaitu tenaga kerja yang upahnya dibayar sesuai pengeluaran untuk tenaga kerja.
- b. Tenaga kerja lainnya yaitu tenaga kerja yang juga dibayar
- c. Tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar (*unpaid family worker*).

2.2.2. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya jumlah penduduk bekerja yang terserap dan tersebar di berbagai sektor ekonomi (Simanjutak, 2008). Setiap sektor memiliki laju pertumbuhan dan daya serap yang berbeda-beda. Laju pertumbuhan yang berbeda-beda di setiap sektornya akan berdampak pada laju peningkatan produktivitas tenaga kerja dan adanya perubahan sektoral. Pada umumnya sektor yang memiliki jumlah tenaga kerja yang besar relatif akan menghasilkan barang dan jasa yang besar pula. Terciptanya kesempatan kerja akan terjadi apabila terdapat permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja.

2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Widodo (2006), menyatakan bahwa indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan

nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun dan mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau/ antar propinsi. Menurut Aryanto (2011), yang lebih relevan untuk digunakan adalah nilai PDRB berdasar harga konstan daripada PDRB atas dasar harga berlaku.

Menurut BPS (2020) Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan atau pun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan dan disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan atau pun yang dikonsumsi pada harga tetap disatu tahun dasar, penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu dan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

2.4. Location Quotient (LQ)

LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (kabupaten atau kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. *Location Quotient* (LQ) dapat untuk mengukur suatu sektor menjadi basis. Teknik ini dapat membantu untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat *self suffience* per sektor atau dengan kata lain alat analisis ini dipakai untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan (industri) sejenis dalam perekonomian regional atau nasional (Bappenas, 2003).

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Provinsi Riau digunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ). Metode ini membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat nasional atau di tingkat regional. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor basis dan merupakan sektor non basis (Kuncoro, 2004).

Kelebihan metode LQ (*Location Quotient*) dalam mengidentifikasi komoditi unggulan antara lain penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan pengolahan data yang rumit. Metode LQ selain memiliki kelebihan juga memiliki keterbatasan yaitu dalam sistem analisis data, metode ini

memerlukan akurasi data atau dalam arti validitas data sangat diperlukan (Hendayana, 2003).

Aplikasi LQ menuju perolehan komoditas unggulan yang didasarkan pada aspek luas areal panen didefinisikan bahwa LQ adalah rasio antara pangsa relatif (share) luas areal panen komoditas *i* pada tingkat wilayah terhadap total luas areal panen subsektor wilayah dengan pangsa relatif luas areal panen komoditas *i* padatingkat nasional terhadap total luas areal panen subsektor nasional (Hendayana, 2003).

2.5. Analisis *Multiplier Effect*

Multiplier effect merupakan konsep yang mengkaji tentang suatu dampak. Konsep ini mempunyai beberapa pandangan yang berbeda-beda khususnya dalam mengkaji dampak-dampak dalam pengembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Bartik (2003) menyebutkan bahwa dalam pengembangan ekonomi, dibutuhkan kebijakan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja pada akhirnya akan menyebabkan *multiplier effect* yang lebih besar.

Pendapat lain seperti Domanski & Gwosdz (2010), menyatakan bahwa *multiplier effect* dapat dilihat melalui pertumbuhan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah dan pelayanan terhadap masyarakat. Dampak yang dihasilkan oleh pertumbuhan suatu usaha tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif.

Dalam menggunakan konsep *multiplier effect* dalam Domanski & Gwosdz (2010), menyatakan bahwa ada dua basis yang digunakan untuk mengukur

multiplier effect seperti jumlah lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan yang diterima dan beberapa riset lain mengukurnya melalui PDRB.

Namun, pengukuran tersebut tidak mutlak karena beberapa pendapat juga memasukkan pengukuran *multiplier effect* diluar bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena dampak dibidang ekonomi sendiri pada akhirnya akan berakibat pada bidang lain apabila adanya suatu peningkatan atau penurunan dalam kegiatan ekonomi (Jamieson, Goodwin and Edmuns, 2004).

Dari definisi *multiplier effect* yang dijelaskan oleh Domanski & Gwosdz (2010) dapat ditarik definisi baru bahwa *multiplier effect* dalam pengembangan ekonomi lokal merupakan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan dibidang tertentu baik positif maupun negatif sehingga menggerakkan kegiatan dibidang-bidang lain karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan pembangunan. Dengan demikian, dari pendapat para ahli tersebut maka *multiplier effect* dalam pembangunan ekonomi dapat disertakan kedalam 2 (dua) bidang yaitu bidang ekonomi dan bidang sosial :

1. Bidang ekonomi

Multiplier effect dibidang ekonomi dapat dilihat dari PDRB, peningkatan pendapatan masyarakat, kemampuan menciptakan atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat (Domanski & Gwosdz, 2010), serta adanya keterkaitan antarsektor terkait yang diakibatkan oleh adanya penambahan permintaan terhadap produksi disektor tertentu (Tarigan, 2001). Sementara Abegunde (2011) menyatakan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi, khususnya perkembangan industri disuatu daerah akan memberikan *spread effect* yaitu adanya transmisi

rekrutmen dan perpindahan pekerja yang dibeli oleh industri tersebut sehingga mempengaruhi pendapatan personal dari masyarakat tersebut. Hal ini memberikan efek negatif bagi daerah yang ditinggalkan.

2. Bidang sosial

Dampak dibidang sosial baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu mempengaruhi tingkat kemiskinan atau taraf hidup masyarakat setempat, solidaritas masyarakat setempat, pelayanan terhadap masyarakat seperti kemudahan mengakses pendidikan dan kesehatan kemudian juga infrastruktur yang mendukung. Ghalib (2005) mengemukakan bahwa dalam ekonomi regional, keterkaitan wilayah menjadi faktor yang sangat penting dan infrastruktur jalan merupakan pengikat kewilayah luar (*Interregional Connections*) maupun antar subwilayah (*Intraregional Connections*), guna memecahkan masalah surplus dan defisit produksi diantara wilayah. Lebih jauh Jamieson, Goodwin and Edmuns (2004) menyatakan bahwa kemiskinan dapat mempengaruhi akses terhadap layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah sehingga akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan beban bagi pemerintah daerah.

2.6. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis perubahan perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. Dari analisis ini diketahui perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah pertumbuhannya cepat atau lambat. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa perubahan kesempatan kerja di suatu wilayah antara tahun dasar dengan tahun akhir analisis dibagi menjadi tiga komponen pertumbuhan,

yaitu: komponen pertumbuhan nasional (*national growth component*) disingkat PN, komponen pertumbuhan proporsional (*proportional or industrial mix growth component*) disingkat PP dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (*regional growth component*) disingkat PPW (Budiharsono, 2005). Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri (misalnya subsidi, kebijakan perpajakan dan price support) dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.

Komponen pertumbuhan pangsa wilayah timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB/kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan wilayah lain. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dengan wilayah lain ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut (Budiharsono, 2005).

Menurut Tarigan (2002), analisis *shift share* adalah metode yang membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kita dengan wilayah nasional. Metode ini lebih tajam dibanding metode LQ. Metode LQ tidak memberi penjelasan atas faktor penyebab perubahan tersebut sedang metode *shift share* memperinci penyebab perubahan itu atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah di dalam pertumbuhannya di dalam satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi nasional. Ada juga yang menamakan model

analisis ini sebagai industrial *mix analysis* karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi laju wilayah pertumbuhan tersebut. Artinya apakah industri yang berlokasi di wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional memang berkembang pesat dan bahwa industri tersebut cocok berlokasi di wilayah itu atau tidak.

Menurut Bappenas (2006) data yang biasa digunakan untuk analisis *shift share* adalah pendapatan per kapita (Y/P), PDRB (Y) atau tenaga kerja (e) dengan tahun pengamatan menurut rentang waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen (Bappenas, 2006) :

- a. *Provincial share* (R), yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota) dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi (provinsi). Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan wilayah provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi maka peranannya terhadap provinsi tetap.
- b. *Proportional (industry-mix) shift* (Sp) adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor i dibandingkan total sektor di tingkat provinsi.
- c. *Differential shift* (Sd), adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah (kabupaten) dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat.

Kedua komponen *shift*, yaitu Sp dan Sd memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. Sp merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara nasional (provinsi), sedangkan Sd adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan.

Apabila nilai Sd dan Sp positif maka sektor yang bersangkutan dalam perekonomian daerah menempati posisi yang baik untuk daerah yang bersangkutan. Sebaliknya bila negatif maka perekonomian daerah sektor tersebut masih dapat diperbaiki antara lain dengan membandingkan dengan struktur perekonomian Provinsi.

Sektor-sektor yang memiliki *differential shift* (Sd) positif maka memiliki keunggulan komparatif terhadap sektor yang sama di daerah lain. Selain itu, sektor-sektor yang memiliki Sd positif berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi di daerah dan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Apabila Sd negatif maka tingkat pertumbuhan sektor tersebut relatif lamban (Bappenas, 2006).

Soepono (1993), kelemahan dari analisis Shift Share salah satunya adalah Analisis Shift Share tidak lebih daripada suatu pengukuran atau prosedur baku untuk mengurangi pertumbuhan suatu variabel wilayah menjadi komponen-komponen. Persamaan hanyalah identity equation dan tidak mempunyai implikasi-implikasi keperilakuan. Metode Shift Share tidak untuk menjelaskan mengapa, misalnya pengaruh keunggulan kompetitif adalah positif di beberapa wilayah, tetapi negatif di daerah-daerah lain. Metode Shift Share merupakan teknik pengukuran yang mencerminkan suatu sistem penghitungan semata dan

tidak analitik. Sedangkan keunggulan Analisis Shift Share adalah dapat melihat perkembangan indikator kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada dua titik waktu tertentu, yang mana satu titik waktu dijadikan sebagai dasar awal analisis, sedangkan satu titik waktu lainnya dijadikan sebagai akhir analisis.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai upaya memperjelas tentang variabel-variabel dan sebagai bahan referensi dalam penelitian. Sehingga tidak terjadi penelitian yang tumpang tindih atau penelitian ulang dengan penelitian terdahulu.

Prats (2017), melakukan penelitian tentang analisis pelaku ekonomi daerah melalui teknik *shift share* dan LQ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang telah menjadi perilaku ekonomi negara bagian Tabasco dari tahun 2003 hingga 2013, untuk menentukan apa efek dari penerapan suatu kebijakan ekonomi memiliki aktivitas produksi yang berbeda, serta dampaknya pada kelompok sosial ekonomi. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif karena pengumpulan datanya dan analisis dilakukan sesuai dengan aturan logis tertentu yang ditetapkan melalui model-model yang menganalisis perilaku dan komposisi ekonomi daerah struktur dan dampaknya pada pengembangan wilayah dan hasilnya menawarkan ringkasan perilaku kegiatan ekonomi yang dilakukan di Negara Bagian Tabasco selama diberikan periode, dan mulai dari kerangka kerja historis ini adalah mungkin untuk menerapkan analisis realitas ekonomi negara dibandingkan dengan yang nasional, melalui Wikipedia Koefisien Lokasi dan Teknik Pergeseran Berbagi Tradisional, digunakan untuk memperkirakan derajat

spesialisasi untuk berbagai sektor, menunjukkan efek nasional pertumbuhan berdasarkan aktivitas sesuai dengan aktivitas negara dan tingkat efisiensi dalam struktur regional.

Suseno dan Anas (2017), melakukan penelitian tentang *multiplier effect* sektor basis terhadap perekonomian daerah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh ekonomi yang ditimbulkan oleh sektor industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi, pada output, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dilihat dari efek *multiplier* terhadap output, pendapatan, dan tenaga kerja sektoral di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Pusat. Data sekunder yang diambil merupakan data Input-Output Provinsi Jawa Tengah tahun 2013. Analisis data yang digunakan adalah analisis Input-Output, *Multiplier Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis *multiplier* output, sektor industri pengolahan memiliki angka *multiplier* output mampu menempati urutan ketiga, yaitu sebesar 2,02060 dari klasifikasi 9 sektor perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Untuk *multiplier* output yang paling tinggi adalah pada sektor bangunan, yaitu 2,25509. Kedua, Hasil analisis *multiplier* pendapatan, sektor jasa-jasa memiliki nilai pengganda pendapatan tertinggi, yaitu 0,59764. Sedangkan untuk sektor industri pengolahan mampu menempati peringkat keenam pada angka *multiplier* pendapatannya, sebesar 0,28543. Ketiga, Hasil analisis *multiplier* tenaga kerja terbesar adalah pada sektor pertanian, yaitu 0,30992 dan untuk sektor industri pengolahan hanya mampu menempati peringkat kelima pada angka *multiplier* tenaga kerja, yaitu sebesar 0,16558. sektor basis mempunyai dampak

pengganda terhadap output, pendapatan dan tenaga kerja. Sektor industri pengolahan memiliki angka multiplier output sebesar 2,02060. Hasil analisis *multiplier* pendapatan, sektor jasa-jasa memiliki nilai pengganda pendapatan tertinggi, yaitu 0,59764. Hasil analisis *multiplier* tenaga kerja terbesar adalah pada sektor pertanian, yaitu 0,30992.

Saputra (2016), melakukan penelitian tentang Peranan Sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hulu, mengetahui pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu, dan memproyeksikan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian untuk lima tahun kedepan (2017-2021) di Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan data sekunder yang berasal dari beberapa literatur publikasi dari lembaga yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data deret waktu (time series) berupa data tahunan dari tahun 2010-2014. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis *location quotient* (LQ), analisis *shift share* dan analisis proyeksi *pure forecast*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Pertama Peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010-2014 yang dianalisis menggunakan *location quotient* (LQ) menunjukan nilai > 1 , berarti sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan sektor basis, artinya sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu telah mampu menyerap tenaga kerja lokal. Kedua, Petumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2010-2014 mengalami pergeseran (*totalchange*) sebesar 15.223,00 jiwa (50,57%). Dimana ini berarti pertumbuhan

jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu tergolong dalam pertumbuhan yang progresif (maju). Ketiga, Berdasarkan hasil proyeksi *pure forecast* dengan mengasumsikan jumlah pertumbuhan tenaga kerja pada tahun 2014 sebesar 0,19 diperoleh hasil proyeksi jumlah tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hulu meningkat pada setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tahun 2017 (132.240 jiwa), tahun 2018 (156.043 jiwa), tahun 2019 (184.132 jiwa), tahun 2020 (217.275 jiwa) dan pada tahun 2021 (256.384 jiwa).

Biki, dkk (2016), melakukan penelitian tentang Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan sektor pertanian dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo. Analisis data menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), *Multiplier Shortrun* (MS), Elastisitas tenaga kerja, dan *Trend Linier* dengan menggunakan variable PDRB dan jumlah Tenaga kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, peranan sektor pertanian dalam perekonomian di Provinsi Gorontalo sangatlah besar dari tahun ke tahun jika dilihat dari nilai PDRB. Akan tetapi jika dilihat dari segi kontribusinya, sektor pertanian mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan sektor-sektor lain semakin berkembang. Walaupun kontribusi sektor pertanian setiap tahunnya menurun namun sektor pertanian masih merupakan sektor basis. Peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja Provinsi Gorontalo tergolong cukup besar dan stabil setiap tahunnya. Dari aspek tenaga kerja sektor pertanian merupakan sektor basis, *multiplier* tenaga kerja sektor pertanian relatif stabil. Elastisitas tenaga kerja cenderung naik kemudian *trend* PDRB dan tenaga kerja juga naik.

Wahyuningsih (2015), melakukan penelitian tentang Peranan Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Buru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar kesempatan kerja sektor pertanian di Kabupaten Buru, mengetahui dan menganalisis tingkat produktivitas kerja sektor pertanian di Kabupaten Buru, mengetahui dan menganalisis berapa besar pengganda tenaga sektor pertanian di Kabupaten Buru, melakukan prediksi kesempatan kerja sektor pertanian di tahun 2006-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskripsi analisis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan rentang waktu 2000-2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesempatan kerja sektor pertanian di Kabupaten Buru mengalami fluktuatif pada setiap tahun, dimana kesempatan kerja yang tertinggi pernah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 121,91 persen dan kesempatan kerja yang terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar -13,41 persen, sedangkan pada tahun 2013 kesempatan kerja sektor pertanian mencapai 3,58 persen. Jika dibandingkan dengan sektor lainnya, kesempatan kerja di sektor pertanian tergolong sedang, artinya bukan sektor ekonomi yang mempunyai tingkat kesempatan kerja yang tinggi ataupun rendah. Kedua, Seiring dengan kesempatan kerja yang berkurang di di tahun 2010, maka produktivitas kerja sektor pertanianpun mengalami penurunan produktivitas di tahun yang sama. Tingkat produktivitas kerja sektor pertanian di Kabupaten Buru terendah dialami pada tahun 2012 sebesar 4,33 persen, sedangkan pada tahun 2013 produktivitas kerja sektor pertanian sebesar 3,87 persen. Secara keseluruhan dari tahun 2001 hingga tahun 2013, produktivitas kerja sektor pertanian Kabupaten Buru tidak

menunjukkan trend yang meningkat, dan apabila dibandingkan dengan produktivitas kerja sektor lain, produktivitas kerja sektor pertanian tergolong sedang. Ketiga, Kesempatan kerja disektor lain yang diciptakan oleh kesempatan kerja sektor pertanian di Kabupaten Buru mengalami fluktuatif. Peningkatan kesempatan kerja sektor lain yang terbesar terjadi pada tahun 2003 yaitu sebanyak 5 orang. Sedangkan angka pengganda kesempatan kerja terendah pada kurun waktu 2001 hingga 2013 terdapat pada tahun 2012 yaitu 1 hingga 2 orang. Keempat, Jika menggunakan asumsi tingkat elastisitas kesempatan kerja sebesar 3,58 dan pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 17,56 seperti yang dialami pada tahun 2013, maka kesempatan kerja sektor pertanian di Kabupaten Buru diperkirakan akan mengalami kenaikan pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

Vaulina dan Elida (2014), melakukan penelitian tentang Analisis Transformasi Struktural Ekonomi di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sektor pertanian (sektor primer) terhadap perekonomian Kota Pekanbaru, dan transformasi struktural di Kota Pekanbaru dengan jangka waktu tahun 1992, tahun 2002, dan tahun 2012. Data dianalisis dengan menggunakan Location Quotient (LQ) dan Shift Share. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dengan data sekunder yaitu data PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 selama periode tahun 1992, tahun 2002, tahun 2012. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan analisis LQ, untuk sektor primer di Kota Pekanbaru nilai LQ berkisar 0,007–0,02. Nilai LQ ini mengandung arti bahwa sektor primer merupakan sektor non basis, sektor ini belum mampu ekspor bahkan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan rata-

rata konsumsi di wilayahnya. Transformasi struktural terjadi di Kota Pekanbaru, sektor primer (1,26%), sektor sekunder (26,47%) dan sektor tersier (72,00%).

Vaulina dan Rahmi (2013), melakukan penelitian tentang Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui seberapa besar peran sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir, apakah sektor pertanian menghasilkan surplus pendapatan dalam perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir dan menganalisis subsektor pada sektor pertanian yang dapat memberikan multiplier efek yang besar terhadap sektor pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan lokasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 selama periode tahun 2003-2012 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Riau. Data dianalisis dengan *Location Quotient* (LQ), surplus pendapatan dan multiplier efek. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan analisis LQ, subsektor perikanan, subsektor tanaman perkebunan dan subsektor tanaman bahan makanan memiliki peran penting dalam perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya dan subsektor kehutanan mempunyai potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Subsektor perkebunan memberikan nilai surplus pendapatan terbesar. Subsektor tanaman bahan makanan memberikan multiplier efek yang meningkat selama tahun analisis.

Safangatun (2011), melakukan penelitian tentang Peranan Sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cilacap, mengetahui pertumbuhan kesempatan kerja sektor pertanian di Kabupaten Cilacap dan mengetahui peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja untuk lima dan sepuluh tahun kedepan di Kabupaten Cilacap. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitik dan menggunakan data sekunder dengan rentang waktu (2005-2009). Analisis data yang digunakan ialah, analisis angka pengganda tenaga kerja, analisis *shift share* dan analisis proyeksi *pure forecast*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Pertama peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cilacap selama tahun 2005-2009 yang dihitung dengan angka pengganda tenaga kerja menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. rata-rata angka pengganda tenaga kerja yang diperoleh dari hasil analisis adalah sebesar 2,54 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan 1 tenaga kerja pada sektor pertanian, maka akan membuka kesempatan kerja total di Kabupaten Cilacap sebanyak 2 hingga 3 tenaga kerja. Kedua, pertumbuhan kesempatan kerja sektor pertanian di Kabupaten Cilacap selama tahun 2005-2009 yang dihitung dengan analisis *shift share* menunjukkan pertumbuhan kesempatan kerja yang progresif (maju). Nilai pergeseran bersih yang diperoleh dari hasil analisis adalah sebesar 35.923,47 atau 14,90%. Ketiga, proyeksi kesempatan kerja sektor pertanian di Kabupaten Cilacap dihitung dengan metode *pure forecast* menunjukkan proyeksi untuk lima dan sepuluh tahun kedepan terus meningkat. Proyeksi kesempatan kerja untuk tahun 2014 sebesar 588.901 jiwa dan tahun 2019 sebesar 1.239.790 jiwa.

Santoso (2010), melakukan penelitian tentang Peranan Sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Wonogiri. Pertanian ini bertujuan

untuk menganalisis dinamika peranan sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Wonogiri, menganalisis pertumbuhan kesempatan kerja di sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri dilihat dari komponen pertumbuhannya dan menganalisis prospek peranan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja pada tahun 2008-2017 di Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitik dan menggunakan data sekunder dengan rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2003-2007. Data analisa yang digunakan ialah analisis angka pengganda tenaga kerja, analisis *shift share* dan ketiga analisis proyeksi *pure forecast*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Pertama peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Wonogiri selama tahun 2003-2007 yang diamati dengan menggunakan angka pengganda tenaga kerja menunjukkan kecenderungan berfluktuasi. Rata-rata hasil perhitungan angka pengganda adalah 1,72 yang berarti bila terjadi peningkatan satu kesempatan kerja di sektor pertanian maka dapat meningkatkan kesempatan kerja secara keseluruhan dalam perekonomian sebanyak satu hingga dua kesempatan. Kedua, Progresifitas pertumbuhan kesempatan kerja di sektor pertanian Kabupaten Wonogiri termasuk kelompok lamban. Ketiga, hasil proyeksi *pure forecast*, diperoleh hasil proyeksi kesempatan kerja sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017 sebesar 329.366 orang atau diperkirakan selama tahun 2008-2017 terjadi kenaikan kesempatan kerja di sektor pertanian sejumlah 101.304 orang dengan rata-rata kenaikan kesempatan kerja setiap tahunnya sejumlah 10.130 orang.

2.8. Kerangka Pemikiran

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Di Indonesia, pembangunan di sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan.

Pembangunan pertanian telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian.

Provinsi Riau dikenal dengan kawasan industri, tetapi bidang pertanian masih memberikan sumbangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ini ditandai dengan meningkatnya setiap tahun kontribusi pertanian dari tahun (2015-2019), sektor ini tetap mempunyai peran penting bagi Provinsi Riau. Besarnya kontribusi sektor pertanian di Provinsi Riau didukung dengan luas lahan salah satunya ialah sawit yang relatif luas yaitu 2,5 juta Ha yang digunakan untuk budidaya sawit dan majunya subsektor perikanan di Provinsi Riau, sehingga sektor pertanian di Provinsi Riau dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Provinsi Riau. (BPS Provinsi Riau,2019).

Dengan mengetahui dan memahami kinerja sektor ekonomi dalam pembangunan maka pemerintah dapat memutuskan serangkaian kebijakan pembangunan, khususnya yang terkait dengan ketersediaan kesempatan kerja yang luas di sektor ekonomi dan dengan berlakunya otonomi daerah merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif, menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya lokalnya bagi kesejahteraan masyarakatnya khususnya Provinsi Riau.

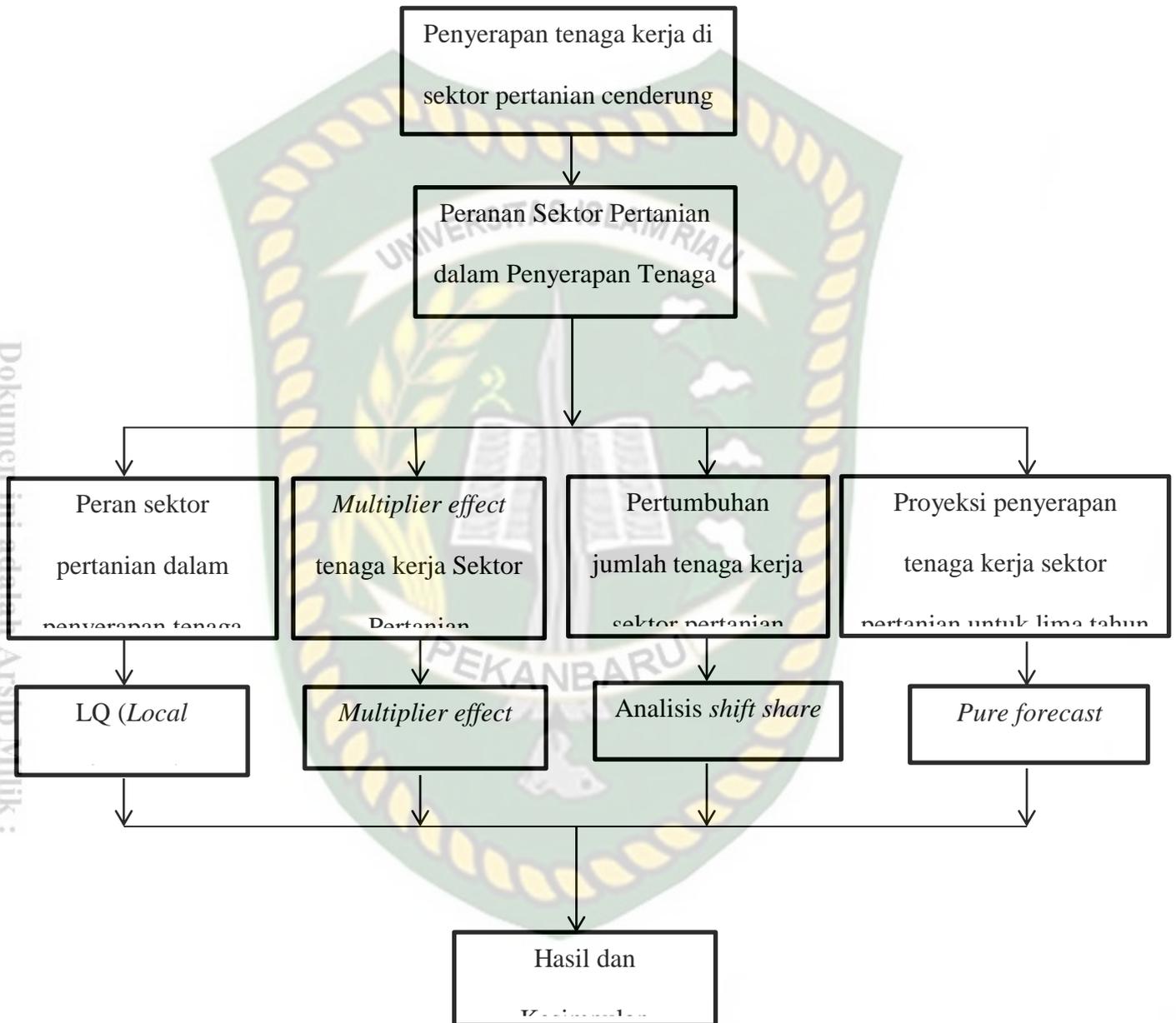
Untuk mengetahui besarnya peranan sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja dapat digunakan rumus perhitungan *Location Quotient* (LQ) dan untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pada sektor basis tersebut terhadap perekonomian wilayah pada masing-masing kabupaten/kota, maka digunakan rumus multiplier effect.

Pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian terhadap perekonomian total wilayah dianalisis dengan menggunakan analisis *Shift Share*, sehingga akan diketahui progresifitas dari sektor pertanian. Untuk melihat proyeksi jumlah tenaga kerja disektor pertanian tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dihitung dengan model proyeksi *Pure Forecast*.

Melihat besarnya potensi sektor pertanian yang dimiliki, maka perlu diteliti lebih lanjut menyangkut keadaan sektor pertanian terutama di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Apakah sektor pertanian tersebut merupakan sektor basis bagi perekonomian wilayahnya, dan seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian wilayah di setiap kabupaten/kota tersebut. Sehingga dapat ditentukan di kabupaten/kota mana sektor pertanian dapat dijadikan sebagai sektor penggerak utama (*leading sector*) bagi perekonomian wilayahnya. Untuk

mempertajam analisa maka dilakukan penganalisaan terhadap masing-masing subsektor pertanian untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian.

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Metode , Tempat dan Waktu Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau karena sebagian besar wilayah Provinsi Riau masih merupakan lahan pertanian yang cukup besar sehingga Provinsi Riau merupakan daerah yang bercorak agraris. Sektor pertanian di Provinsi Riau juga merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan kontribusi terbesar kepada PDRB Provinsi Riau. Tetapi, belum diketahui sejauh mana peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipilihlah Provinsi Riau sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan mulai dari bulan Mei 2020 sampai bulan November 2020, yang meliputi kegiatan pembuatan proposal, pengumpulan data, analisis data, penulisan laporan dan perbanyakan laporan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data deret waktu (*time series*) berupa data tahunan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data tenaga kerja Provinsi Riau, data PDRB Provinsi Riau dan kondisi umum Provinsi Riau.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa literatur publikasi dari lembaga yang ada. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS Provinsi Riau), Bappeda, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Provinsi Riau.

3.3. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan dan menghindari kesalahpahaman agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda sekaligus mempermudah dalam penyusunan serta pelaksanaan penelitian ini maka dibuat defenisi dan batasan operasional sebagai berikut :

1. Sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang dalam proses produksinya yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang menghasilkan barang, dan hewan. Sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan di Provinsi Riau.
2. Tenaga kerja di sektor pertanian adalah jumlah penduduk usia kerja yang mampu menghasilkan produk dan jasa yang secara nyata memberikan kontribusi pada sektor pertanian. Dalam penelitian ini, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian didekati dengan jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian di Provinsi Riau (Orang atau Jiwa).
3. Angkatan kerja adalah penduduk usia lima belas tahun ke atas yang bekerja dan tidak bekerja tetapi mencari kerja atau siap untuk mencari kerja.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun

waktu tertentu (biasanya satu tahun), atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan oleh seluruh unit ekonomi untuk kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor, satuannya adalah rupiah per tahun (Rp/tahun).

5. Peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja adalah kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja pada sektor pertanian dibandingkan dengan kemampuan sektor perekonomian lainnya dalam menyerap tenaga kerja pada suatu daerah tertentu dan waktu tertentu (%).
6. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Dapat juga didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang digunakan dalam suatu kegiatan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa. Perhitungannya didekati dengan jumlah angkatan kerja yang telah bekerja di suatu sektor (satuan jiwa)
7. Pertumbuhan kesempatan kerja sektor pertanian menurut Analisis *Shift Share* adalah hasil penjumlahan persentase perubahan kesempatan kerja berdasarkan nilai komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah, sehingga akan diperoleh nilai pergeseran bersih yang menunjukkan pertumbuhan kesempatan kerja sektor pertanian. Dinyatakan dalam satuan(%).
8. Untuk menghitung *multiflier effect* tenaga kerja sektor pertanian digunakan rumus pengganda. Masalah paling mendasar pada model ekonomi basis adalah masalah *time lag*. Hal ini diakui, bahwa penggandaan basis (*base multiplier* tidak berlangsung secara tepat, karena membutuhkan *time lag* antara responden dari sektor basis terhadap permintaan luar wilayah dan respon dari sektor nonbasis terhadap perubahan sektor basis. Pendekatan yang biasanya dilakukan

terhadap masalah ini adalah mengabaikan masalah *time lag* ini, berdasarkan pernyataan bahwa dalam jangka panjang masalah *time lag* ini pasti terjadi.

9. *Pure forecast* merupakan perhitungan proyeksi berdasarkan kejadian masa lalu.

Perhitungan dilaksanakan dengan mengamati perubahan dan perkembangan masa lalu untuk dapat memperkirakan keadaan di masa yang akan datang.

10. Pergeseran proposional (*proportional shift*) digunakan untuk mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian yang dijadikan acuan. *Proportional shift* disebut juga sebagai bauran industri (*industrial mix*). Dalam penelitian ini *proportional shift* digunakan untuk mengukur perubahan, pertumbuhan dan penurunan pertumbuhan kesempatan kerja sektor pertanian dengan sektor lainnya di Kabupaten Kampar.

11. Pergeseran diferensial (*differential shift*) digunakan untuk membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya dari pada industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. *Differential shift* disebut juga keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Dalam penelitian ini *differential Shift* digunakan untuk menentukan seberapa jauh daya saing pertumbuhan kesempatan kerja sektor pertanian di bandingkan dengan sektor pertanian di wilayah lainnya.

3.4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. “Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diperas sedemikian rupa, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah” (Nazir, 2005). Untuk itu maka perlu dilakukan analisis untuk mencapai hasil dari tujuan penelitian ini, yaitu :

3.4.1. Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian

Untuk mengetahui besarnya peran sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau digunakan perhitungan *Location Quotient* (LQ), Menurut (Tarigan, 2015) rumus *Location Quotient* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_{ij}/X_j}{X_i/X} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

LQ : *Location quotient*

X_{ij} : Nilai PDRB Harga Konstan sektor pertanian provinsi Riau

X_j : Jumlah Nilai PDRB Harga Konstan seluruh provinsi Riau

X_i : Nilai PDRB Harga Konstan sektor pertanian nasional

X : Jumlah Nilai PDRB Harga Konstan seluruh sektor nasional

Kriteria:

$LQ > 1$ = Mempunyai keunggulan komparatif yang mampu untuk memenuhi kebutuhan didalam daerah itu sendiri dan juga mempunyai potensi untuk bisa di ekspor yang merupakan sektor basis.

$LQ < 1$ = Hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan didalam daerah itu sendiri dan tidak mempunyai potensi untuk bisa di ekspor yang merupakan sektor non basis.

$LQ = 1$ = Mampu memenuhi kebutuhan di dalam daerah.

3.4.2. Analisis *Multiplier Effect* Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Menghitung *multiflier effect* tenaga kerja sektor pertanian digunakan rumus pengganda. Masalah paling mendasar pada model ekonomi basis adalah masalah *time lag*. Hal ini diakui, bahwa penggandaan basis (*base multiplier* tidak berlangsung secara tepat, karena membutuhkan *time lag* antara responden dari sektor basis terhadap permintaan luar wilayah dan respon dari sektor nonbasis terhadap perubahan sektor basis. Pendekatan yang biasanya dilakukan terhadap masalah ini adalah mengabaikan masalah *time lag* ini, berdasarkan pernyataan bahwa dalam jangka panjang masalah *time lag* ini pasti terjadi. Beberapa pakar ekonomi wilayah mencoba mengatasi masalah tersebut dengan memodifikasi rumus penggandaan basis. Penggandaan basis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{Penggandaan basis} = \frac{\text{Pendapatan total}}{\text{Pendapatan basis}} \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Pendapatan total} = \text{penggandaan basis} \times \text{pendapatan basis} \dots\dots\dots (3)$$

(Budiharsono, 2001)

Memudahkan pengertian rumus diatas maka digunakan simbol untuk mengganti kata-kata tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, disajikan dibawah ini :

E = Tenaga Kera Total

E_B = Tenaga Kerja Basis

E_n = Tenaga Kerja Nonbasis

M = Penggandaan Basis

Berdasarkan penggunaan simbol-simbol tersebut, maka rumus (2) diatas dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$E = M \times E_B \dots\dots\dots (4)$$

Rumus (1) dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$M = \frac{E}{E_B} = \frac{E_B + E_N}{E_B} \dots\dots\dots (5)$$

$$= \frac{E_B}{E_B} + \frac{E_N}{E_B} \dots\dots\dots (6)$$

$$= 1 + \frac{1}{BSR} \dots\dots\dots (7)$$

Jadi pengganda tenaga kerja jangka pendek (MS) adalah :

$$M = 1 + \frac{1}{BSR} \dots\dots\dots (8)$$

$$BSR = \frac{E_B}{E_N} \dots\dots\dots (9)$$

(Warpani, 1984)

Keterangan :

M : Pengganda tenaga kerja jangka pendek

E_B : Tenaga kerja basis

E_N : Tenaga kerja non basis

3.4.3. Analisis Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Menurut Widodo (2006) analisis *shift share* digunakan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi daerah (kabupaten/provinsi) dan membandingkannya dengan regional (provinsi/negara). Dari perbandingan tersebut dapat diketahui seberapa besar kinerja perekonomian daerah didasarkan pada keunggulan kompetitif sektoral dalam suatu regional. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekan pertumbuhan

sektor di daerah, dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional (Suparno, 2008).

Secara matematis, metode SSA diformulasikan sebagai berikut (Rustiadi dkk., 2011):

$$\underbrace{\left(\frac{X_{ij(t)} - X_{ij(t-1)}}{X_{ij(t-1)}} \right)}_{\text{Pertumbuhan}} = \underbrace{\left(\frac{X_t}{X_{t-1}} - 1 \right)}_{\text{RS}} + \underbrace{\left(\frac{X_{i(t)}}{X_{i(t-1)}} - \frac{X_t}{X_{t-1}} \right)}_{\text{PS}} + \underbrace{\left(\frac{X_{ij(t)}}{X_{ij(t-1)}} - \frac{X_{i(t)}}{X_{i(t-1)}} \right)}_{\text{DS}} \dots \text{.(10)}$$

Keterangan:

- $X_{ij(t)}$: Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor i di provinsi J
- X_i : Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor i nasional
- X : Jumlah penyerapan tenaga kerja seluruh sektor nasional
- t: Tahun t
- t-1 : Tahun t-1
- RS : *Regional share*
- PS : *Proportional shift*
- DS : *Differential shift*

Secara matematis, metode SSA diformulasikan sebagai berikut (Rustiadi dkk., 2011):

$$\Delta X_{i(t)} = RS + PS + DS \dots \text{.(11)}$$

Dimana:

$$\Delta X_{i(t)} = X_{ij(t)} - X_{ij(t-1)} \dots \text{.(12)}$$

$$RS = X_{ij(t-1)} \times \left(\frac{\Delta X_t}{X_{t-1}} \right) \dots \text{.(13)}$$

$$PS = X_{ij(t-1)} \times \left(\frac{\Delta X_{i(t)}}{X_{i(t-1)}} - \frac{\Delta X_t}{X_{t-1}} \right) \dots\dots\dots(14)$$

$$DS = X_{ij(t-1)} \times \left(\frac{\Delta X_{ij(t)}}{X_{ij(t-1)}} - \frac{\Delta X_{i(t)}}{X_{i(t-1)}} \right) \dots\dots\dots(15)$$

Keterangan:

- $X_{ij(t)}$: Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor i di provinsi J
- X_i : Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor i nasional
- X : Jumlah penyerapan tenaga kerja seluruh sektor nasional
- T : Tahun t
- $t-1$: Tahun t-1
- RS : *Regional share*
- PS : *Proportional shift*
- DS : *Differential shift*

Apabila industrial *mix* positif, maka pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Riau mengalami peningkatan yang disebabkan penurunan jumlah tenaga kerja di sektor lainnya, sedangkan apabila industrial *mix* negatif berarti pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Riau mengalami penurunan yang disebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor lainnya. Industrial *mix* merupakan komponen pertumbuhan sektoral yang timbul karena adanya penyerapan dan pergeseran tenaga kerja dari sektoral lainnya.

Apabila *competitive advantage* positif, maka pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Riau mempunyai daya saing yang baik apabila dibandingkan dengan sektor pertanian di wilayah lainnya. Sebaliknya apabila *competitive advantage* negatif, maka pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor

pertanian Provinsi Riau tidak mempunyai daya saing yang baik apabila dibandingkan dengan sektor pertanian di wilayah lainnya. Dari penjumlahan komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan wilayah, dapat diperoleh nilai pergeseran bersih yang digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Riau.

3.4.4. Analisis Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Untuk Lima Tahun Kedepan (2020-2024)

Perkiraan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilakukan dengan model proyeksi *pure forecast* seperti yang dirumuskan oleh Swasono dan Sulistyarningsih (1987), yaitu perhitungan proyeksi yang dilaksanakan dengan mengamati gejala-gejala dan pola pengembangan masa lalu untuk dapat memperkirakan keadaan di masa yang akan datang. Secara sederhana dibuat persamaan:

$$L_{2020-2024} = L_{2015-2019} (1 + G_n)^5 \dots\dots\dots(16)$$

Keterangan:

$L_{2020-2024}$ = Jumlah tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Riau tahun 2020-2024

$L_{2015-2019}$ = Jumlah tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Riau tahun 2015-2019

G_n = Pertumbuhan kesempatan kerja

5 = Selisih tahun proyeksi dengan tahun akhir periode dasar proyeksi

Dari rumus diatas untuk proyeksi tenaga kerja di Provinsi Riau dimulai dari tahun dasar sebanyak 5 tahun yaitu pada tahun 2015-2019 dan tahun proyeksinya adalah tahun 2020-2024.

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Letak Geografi

Menurut BPS (2019), berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Riau berada di Pulau Sumatera dan wilayahnya berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Selat Malaka. Secara astronomis, Riau terletak di antara 01005' Lintang Selatan (LS) dan 02025' Lintang Utara (LU) dan antara 100000' sampai dengan 105005' Bujur Timur (BT).

Batas-batas daerah Provinsi Riau adalah:

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota. Ibukota kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Riau berjarak antara 48 km hingga 211 km dari ibukota provinsi dan berada pada ketinggian sekitar 2 hingga 91 meter dari permukaan laut. Wilayah Provinsi Riau memiliki luas 87.023,66 Km² dan itu berarti setara dengan 18,4 persen dari wilayah Pulau Sumatera.

Di daerah daratan terdapat empat sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan yaitu Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri. Keempat sungai yang membentang dari dataran tinggi Bukit Barisan hingga bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan dipengaruhi pasang surut air laut.

Pada tahun 2019, Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti) dan dua kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, terdapat 169 kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat dan 1.876 kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa.

Tabel 3. Luas Wilayah Riau Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019.

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kuantan singingi	5.259,36
2	Indragiri hulu	7.723,80
3	Indragiri hilir	12.614,78
4	Pelalawan	12.758,45
5	Siak	8.275,18
6	Kampar	10.983,47
7	Rokan hulu	7.588,13
8	Bengkalis	6.975,41
9	Rokan hilir	8.881,59
10	Kepulauan meranti	3.707,84
11	Kota pekanbaru	632,27
12	Kota dumai	1.623,38
13	Jumlah	87.023,66

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2020

Berdasarkan Tabel 3 luas wilayah Provinsi Riau, kabupaten Pelalawan adalah kabupaten dengan luas wilayah terbesar yaitu 12.758,45 Km². Sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah Kota Pekanbaru dengan luas 632,27 Km².

4.2. Letak Topografi

Provinsi Riau memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2 persen (datar) seluas 1.157.006 hektar, kemiringan lahan 15-40 persen (curam) seluas 737.966 hektar. Secara umum topografi Provinsi Riau merupakan daerah dataran rendah dan agak bergelombang dengan ketinggian pada beberapa kota yang terdapat di wilayah Provinsi Riau antara 2-91 m diatas permukaan laut. Kabupaten

Bengkalis merupakan kota yang paling rendah, yaitu berada 2 meter dari permukaan laut. Kebanyakan kota di Provinsi Riau berada dibawah 10 meter diatas permukaan laut, seperti Rengat, Tembilahan, Siak, Bengkalis, Bagan Siapi-api dan Dumai, BPS Riau (2019).

Pada umumnya tanah penyusunan daratan rendah terdiri dari tanah organosol dan glei humas, hidromorf kelabu, podsolik merah kuning dari bahan endapan dan podsolik merah kuning dari bahan aluvial. Sedangkan tanah penyusun daerah perbukitan terdiri dari tanah podsol, podsolik merah kuning dari batuan endapan dan batuan beku, podsolik merah kuning (komplek) dari batuan beku dan podsolik merah kuning latosol dan litosol, BPS Riau (2019).

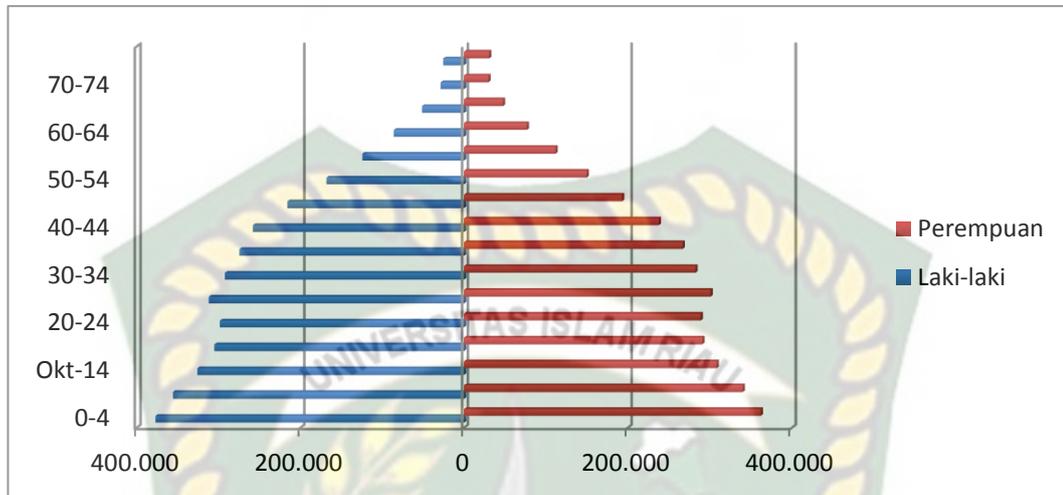
4.3. Demografi

Keadaan demografi adalah suatu keadaan yang menggambarkan jumlah penduduk, *sex ratio*, struktur penduduk dan pendidikan. Jumlah penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. *Sex ratio* adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Struktur penduduk adalah dimana suatu negara yang mempunyai wilayah yang luas dan memiliki banyak penduduk didalam satu negara tersebut.

4.3.1. Penduduk

Jumlah penduduk adalah seluruh penduduk yang berada dan menetap di suatu daerah. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Riau tahun 2018, jumlah penduduk di Provinsi Riau adalah 6.814.909 jiwa yang terdiri dari usia produktif dan non produktif. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Riau.



Sumber: BPS Riau, 2020

Dari gambar 3, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Riau terbanyak ada pada kelompok umur 0-4 tahun, artinya komposisi penduduk usia muda yang belum produktif masih cukup tinggi sehingga perlu kebijakan dari pemerintah terkait kesehatan dan pendidikan penduduk usia balita ini. Komposisi jenis kelamin pada setiap kelompok umur relatif seimbang. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur tua ternyata banyak yang berusia lebih dari 70 tahun dan berjenis kelamin perempuan, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 89.

4.3.2. *Sex Ratio*

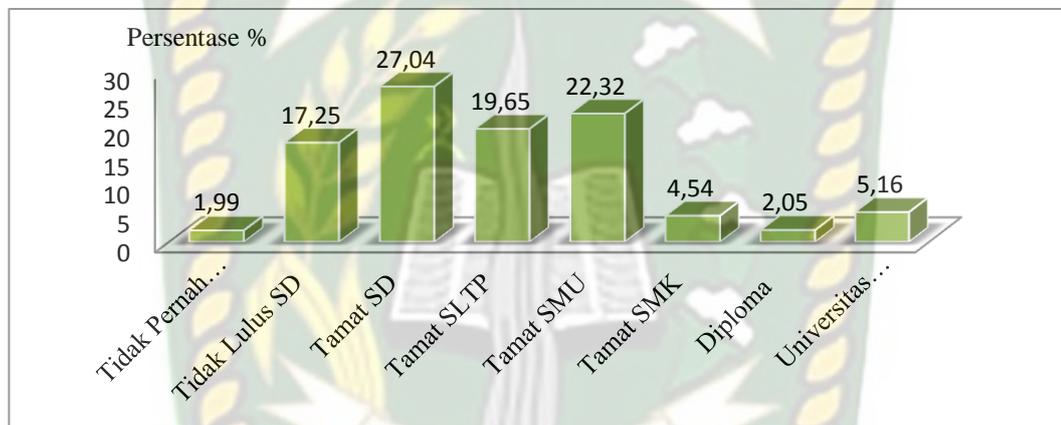
Sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk penduduk Provinsi Riau tahun 2018 sebanyak 6.814.909 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 3.495.705 jiwa dan 3.319.204 jiwa penduduk perempuan. Jadi rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Provinsi Riau tahun 2019 adalah 105. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada Provinsi Riau penduduk yang paling banyak adalah kaum laki-laki.

4.3.3. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Provinsi Riau sangat bervariasi mulai dari SD, SMP, SMU sampai Perguruan Tinggi. Sebaran penduduk Provinsi Riau berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 3:

Gambar 4. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Riau



Sumber: BPS Riau, 2020

Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan dengan jumlah persentase tertinggi di Provinsi Riau adalah tamatan SD sebesar 27,04 persen dari jumlah penduduk Provinsi Riau. Sedangkan penduduk tingkat pendidikan dengan tamatan diploma dan tidak pernah sekolah, yaitu sebesar 2,05 persen dan 1,99 persen dari total penduduk Provinsi Riau.

Dari gambar 3, dapat diketahui bahwa rendahnya tingkat pendidikan terutama disebabkan karena faktor ekonomi penduduk yang sebagian besar masih lemah, sehingga sulit bagi penduduk untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Disamping itu, juga disebabkan karena masih kurangnya kesadaran penduduk untuk bersekolah.

4.4. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk Provinsi Riau terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan pengelolaan sampah, bangunan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa persewaan bangunan, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan dan pertanahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya. Untuk melihat keadaan penduduk yang bekerja menurut mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut 17 Lapangan Usaha di Riau, Tahun 2019 (Jiwa).

No	Lapangan Usaha	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1.194.881	38,45
2	Pertambangan dan penggalian	27.131	0,87
3	Industri pengolahan	218.934	7,04
4	Pengadaan listrik dan gas	7.043	0,22
5	Pengadaan air, pengelolaan Sampah	12.250	0,39
6	Bangunan	146.737	4,72
7	Perdagangan besar dan eceran	558.445	17,97
8	Transportasi dan pergudangan	126.466	4,06
9	Penyediaan akomodasi makan dan minum	149.853	4,82
10	Informasi dan komunikasi	19.162	0,61
11	Jasa keuangan dan asuransi	17.582	0,56
12	Jasa persewaan bangunan	1.115	0,03
13	Jasa perusahaan	31.533	1,01
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan	190.452	6,12
15	Jasa pendidikan	225.924	7,27
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	55.236	1,77
17	Jasa lainnya	124.813	4,01
Jumlah/total		3.107.557	100,00

Sumber: BPS Riau, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Provinsi Riau bekerja di bidang pertanian dengan jumlah jiwa sebesar 1.194.881 (38,45%), kemudian dengan persentase 17,97% masyarakat Riau bekerja dibidang perdagangan besar dan eceran. Lapangan usaha dengan persentase terkecil sebesar 0,03% ialah jasa persewaan bangunan.

4.5. Keadaan Pertanian

A. Tanaman Pangan

Keadaan pertanian palawija di Provinsi Riau merupakan salah satu tanaman pangan yang mempunyai peran dalam pembangunan pertanian di Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya hasil pertanian palawija dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Palawija di Provinsi Riau, 2019

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padi	92.684	365.744	3,946
2	Jagung	12.231	30.765	2,515
3	Ubi Kayu	3.574	124.797	34,918
4	Ubi Jalar	417	3.576	8,575
5	Kacang Kedelai	966	1.119	1,158
6	Kacang Hijau	417	448	1,074

Sumber: BPS Riau, 2020

Berdasarkan Tabel diatas tanaman padi memiliki produksi terbesar dengan nilai 365.744 ton dan hasil produktifitasnya adalah 3,946 ton/ha. Pada hasil tanaman ubi kayu adalah 124.797 ton dan produktifitasnya adalah 34,918 ton/ha dan hasil tanaman jagung adalah 30.765 ton dan produktifitasnya 2,515 ton/ha.

B. Hortikultura

Keadaan pertanian pada kelompok sayuran di Provinsi Riau terdiri dari cabai, ketimun, terong, kacang panjang, bayam, kangkung, sawi, labu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Sayuran di Provinsi Riau 2019

No	Komoditi	Luas Pane (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Cabai	2.309	17.324	7,50
2	Ketimun	1.800	22.631	12,57
3	Terong	1.417	14.154	9,99
4	Kacang panjang	2.219	12.082	5,44
5	Bayam	2.328	11.182	4,80
6	Kangkung	2.361	13.833	5,86
7	Sawi	504	1.968	3,90
8	Labu siam	20	87	4,33
Jumlah		12.958	93.261	54,39

Sumber: BPS Riau, 2020

Berdasarkan Tabel 6 bahwa jumlah produksi sayuran sebesar 93.261 ton dan jumlah hasilnya adalah 54,39 ton/ha. Hasil tanman sayuran tertinggi di Provinsi Riau adalah ketimun sebesar 22.631 ton dan hasilnya adalah 12,57 ton/ha, hasil yang terendah adalah labu siam yaitu sebesar 87 dan hasilnya adalah 4,33 ton/ha. Keadaan pertanian pada kelompok buah-buahan di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 7:

Tabel 7. Produksi Buah-buahan di Provinsi Riau, 2019

No	Komoditi	Produksi (Ton)
1	Pisang	46.587
2	Durian	27.443
3	Duku/Langsar	4.786
4	Mangga	19.743
5	Jeruk	36.151
6	Rambutan	21.903
7	Pepaya	19.783
8	Nenas	95.018
9	Jambu biji	6.060
Jumlah		277.474

Sumber: BPS Riau, 2020

Berdasarkan Tabel 7 bahwa jumlah produksi buah-buahan sebesar 180.428 ton. Hasil tanaman buah tertinggi di Provinsi Riau adalah nenas sebesar 95.018 ton, hasil yang terendah adalah duku/langsat yaitu sebesar 4.786.

C. Perkebunan

Keadaan pertanian perkebunan di Provinsi Riau adalah salah satu tanaman yang mempunyai peran penting dalam pembangunan pertanian di Provinsi Riau.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Luas Panen, Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Riau, 2019

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Karet	487.952	355.613
2	Kelapa	510.925	415.927
3	Kelapa Sawit	2.423.801	7.779.659
4	Kopi	4.511	2.782
5	Pinang	19.494	10.053
6	Enau	17	19
7	Lada	12.740	11.381
8	Gambir	4.858	5.651
9	Kakao	6.543	2.874
10	Sagu	72.438	326.750

Sumber: BPS Riau, 2020

Berdasarkan tabel 8 dapat dijelaskan bahwa komoditi perkebuna di Provinsi Riau terdiri dari: karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, pinang, enau, lada, gambir, kakao dan sagu. Kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan dengan jumlah luas panen dan produksi tertinggi diantara komoditi perkebunan lainnya dengan luas panen seluas 2.423.801 Ha dan jumlah produksi sebanyak 7.779.659 ton. Sedangkan komoditi perkebunan dengan luas panen dan produksi terendah adalah komoditi enau dengan luas panen seluas 17 Ha dan Produksi sebanyak 19 ton.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Peranan Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau

Asumsi metode LQ dalam penelitian ini adalah pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di Provinsi Riau mempunyai pola pertumbuhan yang sama dengan pola pertumbuhan nasional. Budiharsono (2001), mengemukakan bahwa analisis menggunakan metode LQ mengasumsikan bahwa penduduk di wilayah bersangkutan mempunyai pola yang sama dengan permintaan wilayah pola permintaan provinsi.

Untuk menjawab rumusan masalah melakukan analisis basis ekonomi suatu daerah salah satu metode yang digunakan adalah Analisis Location Quotient. Dimana analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis dan sektor non basis dengan menggunakan pendekatan PDRB Provinsi Riau dengan PDRB Nasional. Dimana hal ini digunakan untuk membandingkan jumlah PDRB pada tingkat Nasional.

Hasil perhitungan LQ sektor pertanian di Provinsi Riau pada tahun 2015-2019 memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$. Ini berarti sektor pertanian di Provinsi Riau merupakan sektor basis. Sementara itu untuk sektor lainnya (sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan pengelolaan sampah, bangunan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa persewaan bangunan, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan dan pertanahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya) merupakan sektor nonbasis dan

mempunyai nilai LQ dan rata-rata LQ yang berbeda-beda untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Analisis LQ (*Location Quotient*) Beberapa Sektor/ Lapangan Usaha di Provinsi Riau, tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	1,86	1,92	1,98	2,03	1,92
2	Pertambangan dan Penggalian	2,74	2,66	2,53	2,40	2,25	2,52
3	Industri Pengolahan	1,27	1,30	1,34	1,37	1,43	1,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
6	Konstruksi	0,76	0,77	0,78	0,80	0,82	0,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran	0,62	0,64	0,67	0,69	0,71	0,67
8	Transportasi dan Pergudangan	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
10	Informasi dan Komunikasi	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,24	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23
12	Real Estat	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,30
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,51
15	Jasa Pendidikan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16
17	Jasa lainnya	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
18	Rata-rata	9,56	9,59	9,60	9,60	9,60	9,59

Tabel 9 dapat dilihat hasil perhitungan nilai LQ tenaga kerja di Provinsi Riau menurut lapangan usaha Tahun 2015-2019. Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan merupakan sektor basis ($LQ > 1$) dan berpotensi menjadi kegiatan basis. Sementara itu untuk sektor pengadaan listrik

dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya merupakan sektor non basis ($LQ < 1$).

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat sektor pertanian di Provinsi Riau dari tahun 2015-2019 mempunyai nilai LQ yang meningkat setiap tahunnya yakni berkisar 1,80-2,03. Dimana pada tahun 2015 sektor pertanian mempunyai nilai LQ sebesar 1,80, kemudian pada tahun 2016 sektor pertanian mempunyai nilai LQ sebesar 1,86, pada tahun 2017 sektor pertanian mempunyai nilai LQ sebesar 1,92, lalu pada tahun 2018 sektor pertanian mempunyai nilai LQ sebesar 1,98 dan pada tahun 2019 sektor pertanian mempunyai nilai LQ sebesar 2,03. Hal tersebut menunjukkan Provinsi Riau mampu memenuhi kebutuhan domestik dan mampu mengekspor ke luar daerah. Berdasarkan lapangan usaha, mayoritas penduduk Provinsi Riau bekerja di sektor pertanian. Hal ini selaras dengan keadaan alam Provinsi Riau yang merupakan sektor basis pertanian, dengan subsektor tanaman perkebunan sebagai andalannya dan komoditas sawit menjadi unggulan. Aktivitas yang tergolong dalam basis (unggulan) menunjukkan bahwa mencukupi kebutuhan wilayahnya sendiri karena mampu melebihi pertumbuhan alamiahnya sehingga dapat mengekspor kelebihan produksinya ke wilayah lain. Oleh karena itu aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke

wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya (Adisasmita, 2005).

Sektor pertanian di Provinsi Riau mempunyai nilai rata-rata LQ (1,92), sektor Pertambangan dan Penggalian (2,52), sektor Industri Pengolahan (1,34), sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,05), sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,16), sektor Konstruksi (0,79), sektor Perdagangan Besar dan Eceran (0,67), sektor Transportasi dan Pergudangan (0,20), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,15), sektor Informasi dan Komunikasi (0,17), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (0,23), sektor Real Estat (0,30), sektor Jasa Perusahaan (0,00), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan (0,51), sektor Jasa Pendidikan (0,15), sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,16) dan sektor Jasa lainnya (0,28).

Tabel 9 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian mempunyai nilai rata-rata LQ >1 dan merupakan tertinggi yaitu (2,52), kemudian sektor pertanian (1,92) dan terakhir industri pengolahan (1,34). Hal ini berarti sektor tersebut telah mampu menghasilkan kelebihan produksi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Riau. Fluktuasi yang terjadi selama tahun 2015-2019 karena kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang kurang stabil yang berimbas pada sektor basis di Provinsi Riau. Sementara itu sektor lainnya mempunyai nilai rata-rata LQ <1 yang artinya Sektor tersebut belum mampu menghasilkan kelebihan produksi yang ada di Provinsi Riau serta tidak dapat memenuhi kebutuhan di Provinsi Riau dan membutuhkan kebutuhan dari wilayah lainnya (impor). Hal ini disebabkan kurangnya produktivitas yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan sektor non basis di Provinsi Riau.

Berdasarkan data PDRB (1), sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya yang ada di Provinsi Riau, akan tetapi pada nilai rata-rata LQ sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan nilai rata-rata LQ yang lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian yang berarti sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Riau lebih besar dalam menyerap tenaga kerja lokal dibandingkan dengan sektor pertanian. Hal ini dikarenakan di Provinsi Riau banyak terdapat kegiatan pertambangan dan penggalian terutama penggalian batu koral, kerikil, pasir dan tanah liat yang berada disekitar aliran sungai serta kegiatan pertambangan minyak dan batubara.

Sektor pertanian merupakan sektor basis di Provinsi Riau pada tahun analisis (tahun 2015-2019). Hal ini dikarenakan Provinsi Riau merupakan daerah agraris yang mayoritas penduduknya bekerja disektor pertanian serta kesempatan kerja pada sektor pertanian cukup banyak. Disamping itu, adanya peluasan daerah pertanian terutama sektor perkebunan pada tanaman kelapa sawit serta meningkatnya perusahaan yang bergerak di sektor pertanian seperti pabrik kelapa sawit. Basisnya sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja didukung oleh penelitian Susana, Banu OlfieL (2009) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil perhitungan LQ peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa sektor pertanian dari tahun 2013-2017 merupakan sektor basis kecuali tahun 2004 nilai $LQ = 1$, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2004 tingkat spesialisasi Kabupaten Minahasa sama dengan Provinsi Sulawesi Utara dengan demikian aspek tenaga kerja sektor pertanian Kabupaten Minahasa pada tahun 2004 merupakan sekto

nonbasis. Dimana nilai LQ tahun 2003 (1,16), tahun 2004 (1,00), tahun 2005 (1,11), tahun 2006 (1,19), dan tahun 2007 (1,03).

5.2. *Multiplier Effect* tenaga kerja di Provinsi Riau

Menurut konsep ekonomi basis wilayah, pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah terjadi karena adanya efek pengganda dari pembelanjaan kembali pendapatan yang diperoleh melalui penjualan barang dan jasa yang dihasilkan wilayah itu yang dipasarkan ke luar wilayah. Besarnya kekuatan efek pengganda tersebut yang mendorong pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh koefisien pengganda yang dihasilkan (Budiharsono, 2001).

Menurut Blakely (1994), pengganda pendapatan merupakan aproksimasi terbaik untuk mengetahui potensi perubahan kesejahteraan dari suatu aktivitas ekonomi baru. Asumsi dasarnya bahwa suatu perubahan di sektor produksi akan menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat.

Peran sektor basis dalam meningkatkan pendapatan dari sektor nonbasis tergambar dalam nilai efek pengganda sektor basis (pengganda basis). Berdasarkan analisis multiplier efek (pengganda basis), subsektor yang dianalisis hanya subsektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ (sektor basis). Hal ini disebabkan analisis multiplier efek yang digunakan berdasarkan rumus pengganda basis. Multiplier efek ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar pengganda pendapatan yang disebabkan adanya sektor basis. Oleh sebab itu, sektor basis yang dianalisis adalah sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Multiplier Efek Sektor Pertanian Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Kerja Utama di Provinsi Riau dari Tahun 2015–2019.

Koefisien pengganda pendapatan jangka pendek sektor pertanian (ME) memiliki arti bahwa setiap peningkatan permintaan akhir pada sektor basis sebesar Rp.1 maka akan memperoleh peningkatan *multiplier effect* pada sektor nonbasis sesuai dengan hasil *multiplier effect*. Berdasarkan Gambar 4, sektor pertanian memberikan multiplier efek yang meningkat pada tiap tahun analisis. Ini berarti bahwa setiap peningkatan permintaan akhir sektor pertanian sebesar Rp. 1,000 maka akan memperoleh peningkatan *multiplier effect* pada sektor nonbasis sebesar Rp. 2,169 pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi Rp. 2,413 pada tahun 2016, dan meningkat Rp. 2,465 pada tahun 2017, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya menjadi Rp. 2,601 pada tahun 2018, dan Rp. 2,608 pada tahun 2019. Secara keseluruhan kecepatan kontribusi Provinsi Riau lebih baik dari nasional.

Secara keseluruhan, angka pengganda pendapatan jangka pendek sektor pertanian berada diatas (> 1), yang artinya peningkatan kontribusi sektor pertanian

sebesar satu satuan akan memberikan efek penggandaan dengan nilai yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya sektor tersebut dapat memberikan *multiplier effect* di wilayah ini. Pendapatan yang diperoleh dari sektor basis tersebut pada gilirannya akan menaikkan pendapatan sektor nonbasis, berupa peningkatan investasi, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan konsumsi, serta adanya industri-industri. Ini membuktikan bahwa kegiatan basis mempunyai kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah meningkat, maka produksinya akan meningkat karena adanya keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat. Efek pengganda sangat berperan dalam memacu pertumbuhan wilayah (Tarigan, 2009). Pengolahan sumberdaya alam dapat merupakan basis ekonomi untuk suatu proses pembangunan wilayah. Peningkatan produksi yang dilakukan pada wilayah pengekspor akan mempunyai pengaruh *multiplier*, misalnya pembangunan industri-industri baru atau bahkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengirim berbagai macam komoditas yang akan menunjang diversifikasi ekspornya (Adisasmita, 2008). Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Dengan demikian, pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor yang lain, begitu juga sebaliknya, sehingga perekonomian akan tumbuh cepat (Wijaya dan Atmanti, 2006).

5.3. Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Riau

Analisis *shift share* digunakan untuk mengetahui apakah terjadi proses transformasi struktural di Provinsi Riau. Analisis ini membandingkan perbedaan laju pertumbuhan sektor primer di daerah (kabupaten) dengan wilayah nasional (propinsi). Komponen *national growth* ini dapat dipakai bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional. Komponen *shift* dibagi menjadi dua komponen, yaitu *proportional shift component* atau disebut juga dengan bauran industri (*industrial mix*) dan *differential shift component* atau disebut juga dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Analisis *Shift Share* digunakan untuk memperlihatkan pergeseran tenaga kerja sektor tertentu (pertanian) terhadap sektor ekonomi wilayah pada jangka waktu tertentu dimana dalam penelitian ini digunakan lima tahun yang akan datang. Budiharsono (2005) menyatakan bahwa analisis *shift share* digunakan untuk mengetahui pertumbuhan suatu sektor ekonomi di suatu wilayah berkaitan dengan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. Dari analisis ini diketahui pertumbuhan kesempatan kerja di suatu sektor tertentu di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah bertumbuh cepat atau lambat. Sehingga, Pertumbuhan kesempatan kerja suatu sektor terhadap kesempatan kerja di Provinsi Riau dianalisis menggunakan analisis *shift share* dengan asumsi bahwa pertumbuhan kesempatan kerja di suatu sektor ini dibentuk oleh tiga komponen pertumbuhan kesempatan kerja yaitu komponen pertumbuhan nasional, komponen pertumbuhan proporsional serta komponen pertumbuhan

pangsa wilayah. Hasil analisis *Shift Share* sektor pertanian di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 10:

Tabel 10. Rata-rata Analisis Shift Share Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Kerja Utama di Provinsi Riau, Tahun 2015–2019.

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan	Dekomposisi		
			<i>Regional Share</i>	<i>Proportional Shift</i>	<i>Differential Shift</i>
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-21.304	20.307	-36.316	-5.294
2	Pertambangan dan Penggalian	-2.727	660	-747	-2.640
3	Industri Pengolahan	29.086	3.334	882	24.870
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.667	117	122	1.429
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	1.466	204	783	478
6	Konstruksi	7.027	2.499	-2.736	7.265
7	Perdagangan Besar dan Eceran	25.647	9.319	-446	16.773
8	Transportasi dan Pergudangan	8.668	1.586	1.186	5.895
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.438	2.278	15.657	5.502
10	Informasi dan Komunikasi	5.116	213	858	4.044
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.345	512	-808	1.642
12	Real Estat	56	24	103	-71
13	Jasa Perusahaan	-2.204	575	-436	-2.342
14	Administrasi Pemerintahan	112	2.685	6.094	-8.667
15	Jasa Pendidikan	7.440	3.462	2.406	1.572
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.579	776	1.870	2.933
17	Jasa lainnya	-6.057	1.912	-1.134	-6.834

Berdasarkan Tabel 10, komponen pertumbuhan (*national growth*) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Propinsi Riau pada tahun 2015-2019 mempunyai nilai positif Rp 20,307 dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB di Provinsi Riau. Komponen bauran industri (*industrial mix*) mempunyai nilai negatif, dengan pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Riau sebesar Rp -36,316 lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada sektor yang sama di tingkat nasional. Komponen *competitive advantage* juga mempunyai nilai negatif dengan nilai Rp -5,294 lebih lambat dibandingkan nasional. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Riau pada tahun 2015-2019 mengalami pergeseran sebanyak Rp -21,304. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10.

Berdasarkan Tabel 10, terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Riau memiliki nilai (Rp) yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan sektor industri pengolahan, sektor pedagang besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan sektor lainnya. Ini berarti bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Riau pada tahun 2015-2019 bukan merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk perekonomian wilayah. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Riau tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan sektor industri pengolahan, sektor pedagang besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan sektor lainnya.

Proportional shift yang disebut juga dengan bauran industri (*industrial mix*) di Provinsi Riau paling tinggi terjadi di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui bahwa

perekonomian di Provinsi Riau terkonsentrasi pada sektor industri pengolahan, sektor pedagang besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan sektor lainnya yang tumbuh lebih cepat jika dibandingkan Nasional. Hal ini berarti bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mampu tumbuh dan berkembang di Provinsi Riau.

Competitive advantage (differential shift component) atau disebut sebagai keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) juga terjadi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Adanya pergeseran dari suatu perekonomian mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Riau mempunyai daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Hal ini berarti bahwa keunggulan kompetitif dari sektor ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan nasional.

Berdasarkan analisis *shift share* tahun 2015-2019 dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Riau terjadi perubahan kontribusi sektoral untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar -21,304. Pergeseran ini tidak begitu besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Provinsi Riau merupakan salah satu kawasan potensi berkembang, mampu dijadikan sebagai wilayah yang potensial untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan pengelolaan sampah, bangunan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa persewaan bangunan, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan dan pertanahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya. Menurut Tang (2011), modernisasi

pertanian sebagai hasil dari pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai dalam sektor pertanian saja. Ini berarti bahwa perlu adanya interaksi dan daya dukung wilayah untuk masing-masing sektor.

Perekonomian wilayah merupakan satu kesatuan yang dicirikan dengan adanya hubungan antara sektor ekonomi yang satu dengan sektor ekonomi yang lainnya. Soekartawi (2002), pertanian itu semacam industri hulu, interaksi antara sektor pertanian dan sektor lain (katakanlah industri) akan semakin besar dengan berkembangnya industri hulu yang mengolah bahan baku hasil pertanian menjadi bahan jadi. Sebaliknya, sektor industri sebagai produsen alat-alat pertanian yang hasilnya dapat dipergunakan di sektor pertanian.

Transformasi struktural dari ekonomi berbasis pertanian dan sumber daya alam (*resource based*) ke arah urban-industrial tampaknya masih akan tergantung pada tingkat kesiapan sektor pertanian (Hanafie, 2010). Oleh sebab itu, ke depan diperlukan bantuan tenaga ahli yang mengetahui terhadap sektor-sektor secara lebih spesifik, dengan tujuan untuk menentukan terlebih dahulu kegiatan mana saja (subsektor mana saja) yang memiliki keunggulan komparatif dan perlu dipacu pertumbuhannya di masa yang akan datang.

5.4. Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Untuk Lima Tahun Kedepan (Tahun 2020-2024)

Perencanaan tenaga kerja pada umumnya disusun berdasarkan sasaran pertumbuhan ekonomi dan sasaran pertumbuhan kesempatan kerja. Perencanaan tenaga kerja bertujuan untuk memenuhi jumlah dan mutu tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Dalam sektor perekonomian kemampuan dalam menyerap tenaga kerja setiap sektor ekonomi berbeda-beda. Untuk itu, maka dibutuhkan adanya pengembangan jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya pada tahun analisis, sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peran cukup tinggi dalam penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi belum dipastikan apakah sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi juga untuk lima tahun kedepan. Maka dari itu, dibutuhkan adanya analisis untuk melihat jumlah tenaga kerja yang terserap disektor pertanian untuk lima tahun mendatang. Supaya dapat membantu pemerintah terutama pemerintah Provinsi Riau dalam menentukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk memajukan Provinsi Riau terutama pada sektor pertanian.

Analisis *Pure Forecast* digunakan untuk perhitungan proyeksi dengan berdasarkan kejadian masa lalu. Perhitungan dilaksanakan dengan mengamati gejala dan perkembangannya dimasa lalu untuk memperkirakan keadaan dimasa yang akan datang. Maka dari itu, hasil analisis proyeksi tenaga kerja sektor pertanian pada tahun 2020- 2024 dengan menggunakan metode *pure forecast* dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat hasil proyeksi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Riau pada Tahun 2020-2024 mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Sifat produk yang bersifat musiman menyebabkan kondisi harga produk pertanian menjadi fluktuasi, dimana harga komoditas menjadi rendah pada musim panen, namun tidak mengalami peningkatan pada musim produksi karena diberlakukannya impor bahan pangan oleh pemerintah, sehingga membuat pendapatan petani relatif rendah. Kondisi tersebut membuat sektor pertanian mulai ditinggalkan karena penduduk Provinsi Riau beranggapan bahwa tidak dapat lagi menghidupi kebutuhan hidupnya, sehingga sektor pertanian hanya dijadikan pekerjaan sampingan selain mereka memiliki pekerjaan yang lebih menghasilkan. Penduduk yang mengolah lahan pertaniannya tanpa menggunakan tenaga kerja dari luar, melainkan tenaga kerja keluarga/ kerabat karena lebih efisien.

Berdasarkan proyeksi penyerapan tenaga kerja yang diperoleh ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil suatu kebijakan yang dapat menguntungkan sektor pertanian sehingga sektor pertanian dapat berkembang lebih baik dan dapat terus menyerap tenaga kerja pada tahun yang akan datang. Contoh kebijakan pemerintah untuk lima tahun kedepan seperti kebijakan peningkatan ketahanan pangan, kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian, pengembangan infrastruktur, kebijakan subsidi pertanian, dan kebijakan mendukung program tematik seperti ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan. Sehingga dapat memajukan sektor pertanian serta dapat meningkatkan perluasan penyerapan tenaga kerja.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau tahun 2015-2019 yang di analisis menggunakan *location quotient* (LQ) menunjukkan nilai >1 , berarti sektor pertanian di Provinsi Riau merupakan sektor basis, artinya sektor pertanian di Provinsi Riau telah mampu memenuhi kebutuhan domestik dan mampu mengekspor ke luar daerah.
2. Sektor pertanian memberikan multiplier efek yang meningkat selama tahun analisis.
3. Pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Riau dari tahun 2015-2019 mengalami pergeseran (*total change*) sebesar Rp. 20,307. Ini berarti pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Riau tergolong dalam pertumbuhan yang progresif (maju).
4. Berdasarkan hasil proyeksi *pure forecast* diperoleh hasil proyeksi jumlah tenaga kerja di Provinsi Riau menurun pada setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tahun 2020 (1.173.148 jiwa), tahun 2021 (1.153.096 jiwa), tahun 2022 (1.133.386 jiwa), tahun 2023 (1.114.013 jiwa) dan pada tahun 2024 (1.094.972 jiwa).

6.2. Saran

Adapun beberapa saran yang bisa diberikan, setelah melihat hasil analisis dan pembahasan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyerapan tenaga kerja per subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan supaya di dapatkan hasil yang lebih terperinci sehingga dapat diketahui subsektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak dan juga perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.
2. Sehubungan dengan hasil proyeksi yang menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang positif pada sektor pertanian di setiap tahunnya. Maka perlu adanya kebijakan pembangunan dalam pengembangan sektor pertanian di Provinsi Riau supaya sektor pertanian tetap mampu dalam menyerap tenaga kerja pada tahun-tahun seperti yang diproyeksikan. Sehingga masalah kepadatan penduduk dan ketenagakerjaan dapat teratasi terutama di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abegunde, A. A. 2011. *Community Development in Africa through Indigenous Agroallied Industries : a Resource to Bottom-up Strategy*. *International Journal of Business and Sosial Science Science*, 2 (18):
- Aprianto, 2005. *Agroindustri Dalam Perspektif Sosial Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah BPFEUGM*, Yogyakarta.
- Artoyo, A.R. 1999. *Tenaga Kerja Perusahaan: Pengertian dan Peranannya*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2019. *Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Riau 2019*. Badan Pusat Statistik, Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2019. *Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia 2019*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2000. *Keadaan Pekerja/Buruh/Karyawan di Indonesia*, BPS Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2015. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Riau 2015*. Badan Pusat Statistik, Pekanbaru.
- _____. 2018. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Riau Agustus 2018*. Badan Pusat Statistik, Pekanbaru.
- _____. 2015. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2015*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. 2016. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2016*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. 2017. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2017*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. 2018. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2018*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. 2019. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2019*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

- Badan Pusat Statistik. 2018. Riau dalam Angka. Provinsi Riau, Pekanbaru.
- _____. 2019. Riau dalam Angka. BPS Provinsi Riau, Pekanbaru.
- _____. 2020. Riau dalam Angka. BPS Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Bartik, T.J. 2003. *Local Economic Development Policies. Upjohn Institute Staff Working Paper No. 03-91. The W.E. Upjohn Institute for Employment Research. Kalamazoo, Michigan.*
- Bappenas. 2006. Perangkat Analisis untuk Perencanaan. <http://www.bappenas.go.id/index/php>. [diakses pada tanggal 12 april 2007]
- Biki, Rumagit, Ngangi. 2016. Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Gorontalo. *Jurnal ASE*, 12 (1): 73-86.
- Blakely, J. 1994. *Planning Local Economic Development. Theory and Practice. 2nd Ed. Sage Publication.*
- Brawijaya. 2008. Arah Pembangunan Sektor Pertanian Masa Datang. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang
- Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Pustaka Sains dan Teknologi. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____. 2005. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Pradnya Paramita, Jakarta
- Daniel, M. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Bumi Aksara, Jakarta.
- Darwanto, H. 2006. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah. Bappenas, Jakarta
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: YPP/Penafsir Al-Qur'an. 1987.
- Domanski, and Gwosdz Krzysztof. 2010. *Multiplier Effect in Local and Regional Development. Quaestiones Geographicae* 29 (2), Adam Mickiewicz University Press, Poznan 2010, pp. 27-37
- Fahmi, S. I. 2011. Peranan Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Cilacap. Skripsi Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. [Tidak dipublikasikan]

- Ghalib. 2005. *Ekonomi Regional*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Andi, Yogyakarta.
- Hendayana, R. 2003. *Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional*. IPB, Bogor.
- Kuncoro, M. 2004. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan edisi ke empat*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik. Ekonomika Pembangunan*. Erlangga, Jakarta.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, T. 2007. *Pembangunan Desa Dari Modernisasi ke Liberalisasi*. Satu Nama, Yogyakarta.
- Payaman, J Simanjuntak. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Penerbit FE UI, Jakarta.
- Pranadji T. 2003. *Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Deptan RI, Jakarta.
- Prats, G. M. 2017. *Analysis of the Behavior of a Regional Economy through the Shift-Share and Location Quotient Techniques*. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Mexico.
- Rustiadi, E. S.H. Sunsun dan R.P Dyah. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Santoso, W. 2010. *Peranan Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Wonogiri*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. [Tidak dipublikasikan]
- Safangatun, F.I. 2011. *Peranan Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang*. Skripsi, Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. [Tidak dipublikasikan]
- Saputra, R. 2016. *Peranan Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Indragiri Hulu*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Islam Riau, Pekanbaru. [Tidak dipublikasikan]
- Simanjuntak, P. ,1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. LPFEUI. Jakarta.

- Soekartawi. 2002. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparno. 2008. Ketrampilan Dasar Menulis. Jakarta : Universitas Terbuka
- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi Offset, Yogyakarta.
- Suseno dan Anas, 2017. Multiplier Effect Sektor Basis Terhadap Perekonomian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, 2 (2): 113-125.
- Swasono dan Sulistyaningsih. 1987. Metode Perencanaan Tenaga Kerja Tingkat Nasional, Regional dan Perusahaan. BPFE, Yogyakarta.
- Tang, K. 2011. Industrial Organization Transformation Oriented Agricultural Modernization with Chinese Characteristics: From the Perspective of Industrial and Agricultural Interaction. International Journal of Business and Management, 6(5): 211-216.
- Tarigan, R. 2005. Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. 2011. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Tarigan, H. G. (2015). Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, Bandung.
- Tjiptoherijanto, P. 1999. Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Pembangunan Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Undang – Undang No.13 Tahun 2003. Bab 1 Pasal1 Ayat2. Ketenagakerjaan. Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Vaulina dan Elida. 2014. Analisis Transformasi Struktural Ekonomi di Kota Pekanbaru. Jurnal Dinamika Pertanian Universitas Islam Riau, 29 (1): 69-78.
- Vaulina dan Rahmi. 2013. Peran Sektor Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Jurnal Dinamika Pertanian Universitas Islam Riau, 28 (3): 245-254.
- Wahyuningsih, T. 2015. Sektor Pertanian dan Perannya dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Buru. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 11 (2): 156-171.
- Warpani, S. 1984. Analisis Kota dan Daerah. ITB, Bandung.

Widodo. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektoral di Sumatera Utara. *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Ekonomi Pembangunan USU, Medan. [Tidak dipublikasikan]

Wresniwiro. 2012. Beberapa Aspek Penggunaan Zat Psikoaktif. *Jurnal Psikologi*. Yogyakarta: Rohima Press

